



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN  
TEGALLALANG TAHUN 2024–2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi harmonis berdasarkan falsafat *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka* Bali di daerah, diperlukan adanya rencana detail tata ruang;
  - b. bahwa untuk kelancaran pembangunan di kawasan Kecamatan Tegallalang dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043, mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelayanan kawasan diatur dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN 2024-2044.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
7. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat), dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa.
8. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
9. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *Utama Mandala*, *Madya Mandala* dan *Nista Mandala*.
10. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan* Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan Ruang

wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
24. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
27. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan atau kompensasi pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
28. Teknik Peraturan Zonasi Khusus yang selanjutnya disebut TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki zona, yang penetapan lokasinya dalam Peraturan Zonasi yang dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
29. Teknik Peraturan Zonasi Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*) yang selanjutnya disebut TPZ Zona Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan yang dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
30. Teknik Peraturan Zonasi Lainnya yang selanjutnya disebut TPZ Lainnya adalah TPZ yang dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

31. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
32. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
33. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
34. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
35. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
36. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
37. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
38. Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
39. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan hewan.
40. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
42. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau konduktor di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilo volt).
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilo volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat atau penghantar di udara bertegangan di 220 v (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 v (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
47. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
49. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
53. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
54. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
55. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.
56. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

58. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
59. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
63. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
66. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
67. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
68. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
69. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa Zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
70. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
71. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah peruntukan Ruang yang menjadi bagian dari air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
72. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air,



termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

73. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
74. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-3 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan atau bagian wilayah kecamatan.
75. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
76. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi-kisi Jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan.
79. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukkan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
80. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

83. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
84. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
85. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
89. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
90. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
91. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
92. Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
93. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok-kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
96. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
97. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
98. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kantor Pertanahan setempat untuk Zona R.
99. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
100. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
101. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
102. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

105. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
106. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
107. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
108. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan karena adanya Zona yang bertampalan dengan Zona P peruntukan utamanya.
109. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
110. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
111. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. kelembagaan.

## BAB II WILAYAH PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Wilayah Perencanaan RDTR Kecamatan Tegallalang disebut sebagai WP Kecamatan Tegallalang meliputi:
  - a. administrasi WP Kecamatan Tegallalang;
  - b. batas WP;
  - c. SWP; dan
  - d. Blok.

- (2) Administrasi WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Ruang darat wilayah Kecamatan Tegallalang berada pada koordinat 08°51'98" Lintang Selatan dan 115°25'73" Bujur Timur dengan luas 6.732,70 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tujuh nol) hektare seluruh *Palemahan* Desa Adat yang terdiri dari 7 (tujuh) Desa, meliputi:
  - a. Desa Kedisan dengan luas 717,43 (tujuh ratus tujuh belas koma empat tiga) hektare;
  - b. Desa Keliki dengan luas 441,89 (empat ratus empat puluh satu koma delapan sembilan) hektare;
  - c. Desa Kenderan dengan luas 601,59 (enam ratus satu koma lima sembilan) hektare;
  - d. Desa Pupuan dengan luas 1.265,65 (seribu dua ratus enam puluh lima koma enam lima) hektare;
  - e. Desa Sebatu dengan luas 929,28 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) hektare;
  - f. Desa Taro dengan luas 2.055,63 (dua ribu lima puluh lima koma enam tiga) hektare; dan
  - g. Desa Tegallalang dengan luas 721,22 (tujuh ratus dua puluh satu koma dua dua) hektare.
- (3) Batas WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli, Kecamatan Tampaksiring;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ubud; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payangan.
- (4) WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP, meliputi:
  - a. SWP A meliputi wilayah administrasi Desa Kedisan, Desa Keliki, Desa Kenderan, Desa Tegallalang dengan luas 2.482,13 (dua ribu empat ratus delapan puluh dua koma satu tiga) hektare; dan
  - b. SWP B meliputi wilayah administrasi Desa Pupuan, Desa Sebatu, Desa Taro dengan luas 4.250,56 (empat ribu dua ratus lima puluh koma lima enam) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:
  - a. Blok I.A.1 dengan luas 441,89 (empat ratus empat puluh satu koma delapan sembilan) hektare;
  - b. Blok I.A.2 dengan luas 379,59 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima sembilan) hektare;
  - c. Blok I.A.3 dengan luas 341,63 (tiga ratus empat puluh satu koma enam tiga) hektare;
  - d. Blok I.A.4 dengan luas 601,59 (enam ratus satu koma lima sembilan) hektare;
  - e. Blok I.A.5 dengan luas 417,41 (empat ratus tujuh belas koma empat satu) hektare; dan
  - f. Blok I.A.6 dengan luas 300,02 (tiga ratus koma nol dua) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi:

- a. Blok I.B.1 dengan luas 624,15 (enam ratus dua puluh empat koma satu lima) hektare;
  - b. Blok I.B.2 dengan luas 485,02 (empat ratus delapan puluh lima koma nol dua) hektare;
  - c. Blok I.B.3 dengan luas 971,49 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma empat sembilan) hektare;
  - d. Blok I.B.4 dengan luas 641,50 (enam ratus empat puluh satu koma lima nol) hektare;
  - e. Blok I.B.5 dengan luas 444,26 (empat ratus empat puluh empat koma dua enam) hektare; dan
  - f. Blok I.B.6 dengan luas 1.084,14 (seribu delapan puluh empat koma satu empat) hektare.
- (7) WP RDTR Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peta Administrasi Wilayah Perencanaan, Lampiran I.B Peta Pembagian SWP, dan Lampiran I.C Peta Pembagian Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk:

- a. mewujudkan Kawasan Tegallalang sebagai kawasan pariwisata alam dan budaya berbasis lingkungan, pertanian dan budaya Masyarakat; dan
- b. meningkatkan perekonomian dan keseimbangan lingkungan.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana jaringan persampahan;
  - h. rencana jaringan drainase; dan
  - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perkotaan Tegallalang pada SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Sebatu di SWP B Blok I.B.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pusat lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1;
  - b. pusat lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4;
  - c. pusat lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6;
  - d. pusat lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan
  - e. pusat lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa Jalan umum, meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer;
  - b. Jalan Lokal Primer; dan
  - c. Jalan Lingkungan Primer.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Bayad – Tiingpuun terdapat pada SWP A dan SWP B;
  - b. Bayad-Manuaba – Gentong terdapat pada SWP A;
  - c. Belong – batas Bangli terdapat pada SWP B;
  - d. Belong – Tebuana terdapat pada SWP B;
  - e. Bilukan – Taro terdapat pada SWP B;
  - f. Jasan – Timbul terdapat pada SWP B;
  - g. Jalan Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A;

- h. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
- i. Keliki-Sebali – Payogan terdapat pada SWP A;
- j. Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A;
- k. Manukaya – Calo terdapat pada SWP B;
- l. Melinggih – Kelusa terdapat pada SWP A;
- m. Tampaksiring - Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B;
- n. Taro - Pakuseba - batas Bangli terdapat pada SWP B;
- o. Tegallalang – Kelusa terdapat pada SWP A;
- p. Tegalpayang – Manukaya terdapat pada SWP B;
- q. Timbul - Perean - batas Bangli terdapat pada SWP B;
- r. Timbul-Tiingpuun – Calo terdapat pada SWP B;
- s. Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung terdapat pada SWP A;
- t. Teges – Tegallalang – Bayung Gede terdapat pada SWP A dan SWP B; dan
- u. Jalan Kolektor Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.

(3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Bukian – Tagtag terdapat pada SWP B;
- b. Calo – Sebatu terdapat pada SWP B;
- c. Jasan – Jati terdapat pada SWP B;
- d. Jalan Bambu terdapat pada SWP B;
- e. Jalan Duryadana terdapat pada SWP A;
- f. Jalan Kelabang Moding Gang Mangening terdapat pada SWP A;
- g. Jalan Lanyahan terdapat pada SWP A;
- h. Jalan Mawar terdapat pada SWP A;
- i. Jalan Mawar Gang I terdapat pada SWP A;
- j. Jalan Mawar Gang III terdapat pada SWP A;
- k. Jalan Mawar Gang IV terdapat pada SWP A;
- l. Jalan Mawar Gang V terdapat pada SWP A;
- m. Jalan Nusa Sinta terdapat pada SWP A;
- n. Jalan Pura Dalem *Banjar* Belong terdapat pada SWP B;
- o. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
- p. Jalan Raya Bonjaka terdapat pada SWP B;
- q. Jalan Raya Desa Sentanu terdapat pada SWP A;
- r. Jalan Raya Kenderan terdapat pada SWP A;
- s. Jalan Raya Salak terdapat pada SWP A;
- t. Jalan Suda Mala terdapat pada SWP A;
- u. Jalan Sukaluwih terdapat pada SWP A;
- v. Kedisan – Bayad terdapat pada SWP A;
- w. Kedisan – Cebok – Tegallalang terdapat pada SWP A;
- x. Kedisan – Pakudui – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B;
- y. Kedisan – Tangkup – Tegallalang terdapat pada SWP A;
- z. Kelusa – Taro terdapat pada SWP B;
- å. Kerta – Puhu – Puakan terdapat pada SWP B;
- bb. Let – Patas terdapat pada SWP B;
- cc. Manuaba – Dukuh terdapat pada SWP A;
- aa. Mumbi – Perean terdapat pada SWP B;
- ee. Sambahan – Kelabang Moding terdapat pada SWP A;
- ff. Sebatu – Bayad terdapat pada SWP A dan SWP B;
- gg. Taro – Ked terdapat pada SWP B;
- ee. Telepud – Sebatu – Bilukan terdapat pada SWP B;



- ii. Timbul – Calo terdapat pada SWP B; dan
  - jj. Jalan Lokal Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Mawar Gang II terdapat pada SWP A;
  - b. Jalan Mawar Gang VI terdapat pada SWP A;
  - c. Jalan Mawar Gang VII terdapat pada SWP A;
  - d. Jalan Raya Bima terdapat pada SWP A;
  - e. Jalan Raya Desa Kenderan terdapat pada SWP A;
  - f. Jalan Suda Mala terdapat pada SWP A; dan
  - g. Jalan Lingkungan Primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi SUTT terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTM; dan
  - b. SUTR.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Gardu Distribusi, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.1, I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
  - a. jaringan tetap;
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik; dan
  - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. bangunan sumber daya air; dan
  - b. sistem jaringan irigasi.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pintu Air; dan
  - b. Prasarana Irigasi.
- (3) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2.
- (4) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan

- c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (6) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
  - (7) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat pada seluruh SWP A dan SWP B.
  - (8) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat pada seluruh SWP A dan SWP B.
  - (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum  
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit distribusi berupa Jaringan Distribusi Pembagi terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.6;
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Jaringan Persampahan  
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
  - a. TPS3R; dan
  - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4.

- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A dan SWP B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Titik Kumpul;
  - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
  - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.3; dan
  - b. SWP B Blok I.B.3.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan
  - b. SWP B Blok I.B.6.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Tegallalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kecamatan Tegallalang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS; dan
- c. Zona RTH.

Paragraf 2

Zona Badan Air

Pasal 17

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan seluas 54,27 (lima puluh empat koma dua tujuh) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 24,91 (dua puluh empat koma sembilan satu) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dengan luas 29,37 (dua puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare.

Paragraf 3  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 18

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan luas 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare.

Paragraf 4  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 19

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c seluas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona RTH-3;
  - b. Sub-Zona RTH-4; dan
  - c. Sub-Zona RTH-7.
- (2) Sub-Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare terdapat pada SWP A Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare.
- (4) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,09 (delapan koma nol sembilan) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 20

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;

- c. Zona W;
- d. Zona KPI;
- e. Zona R;
- f. Zona SPU;
- g. Zona K;
- h. Zona KT; dan
- i. Zona HK.

Paragraf 2  
Zona Badan Jalan  
Pasal 21

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 81,92 (delapan puluh satu koma sembilan dua) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 27,16 (dua puluh tujuh koma satu enam) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 54,76 (lima puluh empat koma tujuh enam) hektare.

Paragraf 3  
Zona Pertanian  
Pasal 22

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 4.588,37 (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma tiga tujuh) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona P-1;
  - b. Sub-Zona P-2; dan
  - c. Sub-Zona P-3.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 809,58 (delapan ratus sembilan koma lima delapan) hektare terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dengan luas 541,03 (lima ratus empat puluh satu koma nol tiga) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 dengan luas 268,55 (dua ratus enam puluh delapan koma lima lima) hektare.
- (3) Sub-Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 495,88 (empat ratus sembilan puluh lima koma delapan delapan) hektare terdapat pada SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6.
- (4) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3.282,91 (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma sembilan satu) hektare terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 1.037,48 (seribu tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 2.245,44 (dua ribu dua ratus empat puluh lima koma empat empat) hektare.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata  
Pasal 23

Zona W sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c dengan luas 68,73 (enam puluh delapan koma tujuh tiga) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dengan luas 67,86 (enam puluh tujuh koma delapan enam) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.2 dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare.

Paragraf 5  
Zona Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 24

Zona KPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d dengan luas 1,52 (satu koma lima dua) hektare terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.6 dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dengan luas 1,46 (satu koma empat enam) hektare.

Paragraf 6  
Zona Perumahan  
Pasal 25

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 1.425,12 (seribu empat ratus dua puluh lima koma satu dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona R-3; dan
  - b. Sub-Zona R-4.
- (2) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 521,35 (lima ratus dua puluh satu koma tiga lima) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 477,69 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam sembilan) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.3 dengan luas 43,66 (empat puluh tiga koma enam enam) hektare.
- (3) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 903,77 (sembilan ratus tiga koma tujuh tujuh) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 109,71 (seratus sembilan koma tujuh satu) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 794,06 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma nol enam) hektare.



Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Pasal 26

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dengan luas 21,61 (dua puluh satu koma enam satu) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,10 (satu koma satu nol) hektare, terdapat pada SWP A Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,60 (dua koma enam nol) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.5 dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 1,60 (satu koma enam nol) hektare.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,15 (enam koma satu lima) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dengan luas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dengan luas 4,17 (empat koma satu tujuh) hektare.
- (5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare, terdapat pada:
  - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 dengan luas 4,10 (empat koma satu nol) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dengan luas 7,66 (tujuh koma enam enam) hektare.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa  
Pasal 27

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan luas 449,22 (empat ratus empat puluh sembilan koma dua dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona K-2; dan
  - b. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 212,39 (dua ratus dua belas koma tiga sembilan) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dengan luas 117,52 (seratus tujuh belas koma lima dua) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dengan luas 94,86 (sembilan puluh empat koma delapan enam) hektare.
- (3) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 236,83 (dua ratus tiga puluh enam koma delapan tiga) hektare, terdapat pada:
- a. SWP A Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan I.A.6 dengan luas 54,33 (lima puluh empat koma tiga tiga) hektare; dan
  - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dengan luas 182,50 (seratus delapan puluh dua koma lima nol) hektare.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran  
Pasal 28

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6 dengan luas 0,65 (nol koma enam lima) hektare; dan
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare.

Paragraf 10  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 29

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Komando Rayon Militer (Koramil) 1616-06/Tegallalang terdapat pada SWP B Blok I.B.2.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 30

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Tegallalang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 31

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 32

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;
  - e. swasta; dan/atau
  - f. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, terdiri dari 5 (lima) tahapan meliputi:
  - a. tahap I periode tahun 2024;
  - b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
  - c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;

- d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
  - e. tahap V periode tahun 2040 – 2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi; dan
  - f. Penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
  - b. TPZ.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

- (6) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Bonus *Zoning*;
  - b. TPZ Khusus;
  - c. TPZ Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*); dan
  - d. TPZ Lainnya.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
    1. pembatasan waktu pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan;
    2. pembatasan luas Pemanfaatan Ruang atau proporsi Pemanfaatan Ruang dalam Sub-Zona; dan
    3. pembatasan jumlah Pemanfaatan Ruang.
  - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B, berupa pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimum serta memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
  - d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas Kaveling Minimum.

- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur untuk Zona R yaitu sebesar 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB maksimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
  - d. JBS minimum;
  - e. JBB minimum; dan
  - f. tampilan bangunan.
- (2) Pengaturan tambahan tata bangunan pada Sub-Zona P-1, Sub-Zona P-2, Sub-Zona P-3, Zona W, Zona KPI, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4, Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2, Sub-Zona SPU-3, Sub-Zona SPU-4, Zona KT, Zona HK dapat diberikan apabila:
  - a. bangunan kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB;
  - b. bangunan deret tidak diberlakukan JBS dan JBB; dan
  - c. bangunan yang memiliki kavling 100 (seratus) meter persegi dengan lebar kurang dari 8 (delapan) meter hanya diberlakukan JBS pada satu sisi.
- (3) TB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum yang meliputi:
  - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
  - b. bangunan terkait peribadatan;
  - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
  - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
  - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
  - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
  - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
  - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (4) Dalam hal pelaksanaan TB terhadap bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

- (5) Penerapan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 37

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf d, berupa ketentuan yang mengatur kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus  
Pasal 38

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan khusus LP2B;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana, meliputi:
    1. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
    2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi.
  - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, meliputi:
    1. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
    2. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
  - d. ketentuan khusus kawasan sempadan, meliputi ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan tercantum dalam Lampiran XVIII.A Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, Lampiran XVIII.B Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana,

Lampiran XVIII.C Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, dan Lampiran XVIII.D Peta Ketentuan Khusus Sempadan Sungai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (5) huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
  - b. pemberian insentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
  - c. pemberian disinsentif dapat dilakukan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
  - d. pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat; dan
  - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (5) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;



- d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (6) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana;
  - b. pengenaan kompensasi; atau
  - c. penalti.
- (7) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan pajak yang tinggi;
  - c. pengenaan kompensasi; atau
  - d. penalti.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Teknik Peraturan Zonasi  
Pasal 40

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Bonus *Zoning* dengan kode b;
  - b. TPZ Khusus dengan kode j;
  - c. TPZ Pertampalan Aturan (*Overlay Zone*) dengan kode g; dan
  - d. TPZ Lainnya dengan kode m.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) RDTR Kecamatan Tegallalang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Tegallalang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dimuat dalam bentuk ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan, terhadap Zona dan atau Sub-Zona yang dilintasi jaringan tersebut dimuat dalam ketentuan khusus meliputi:
  - a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan pada sempadan SUTT selain fasilitas penunjang listrik;
  - b. Zona R pada sempadan SUTT tidak diperbolehkan adanya kegiatan hunian;
  - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan; dan
  - d. diperbolehkan bersyarat fasilitas penunjang operasional jaringan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. permohonan izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses harus mengacu pada Peraturan Bupati ini;
- b. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini, yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- d. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Januari 2024

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



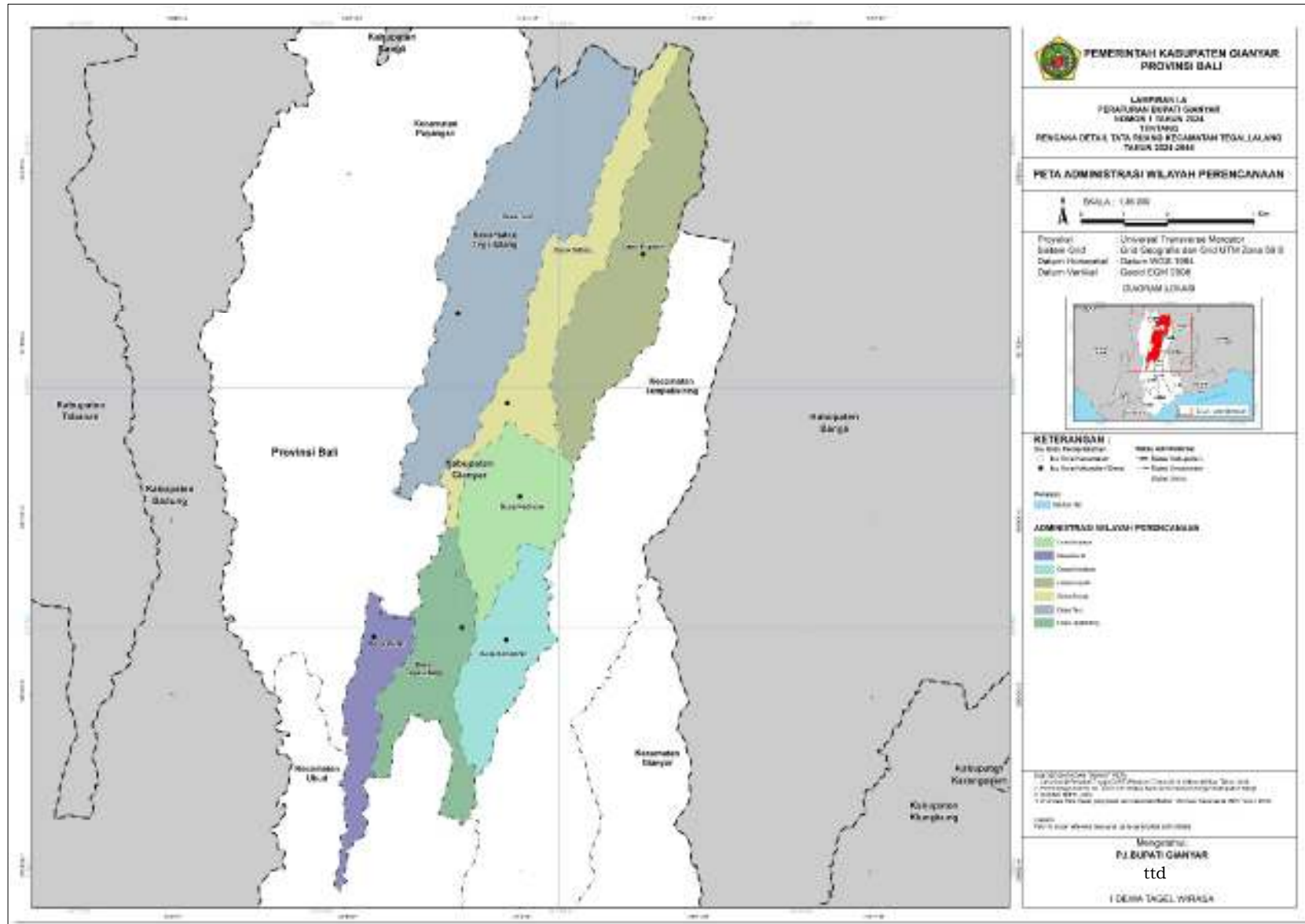
I WAYAN MADI, SH., MH.  
PENATA TK I (III/d)  
NIP 197601102006041011

DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TEGALLALANG TAHUN  
2024-2044

|                  |   |
|------------------|---|
| Lampiran I.A     | : Peta Administrasi Wilayah Perencanaan                           |
| Lampiran I.B     | : Peta Pembagian SWP  |
| Lampiran I.C     | : Peta Pembagian Blok   |
| Lampiran II      | : Peta Rencana Struktur Ruang                                     |
| Lampiran III     | : Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan                       |
| Lampiran IV      | : Peta Rencana Jaringan Transportasi                              |
| Lampiran V       | : Peta Rencana Jaringan Energi                                    |
| Lampiran VI      | : Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi                            |
| Lampiran VII     | : Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air                           |
| Lampiran VIII    | : Peta Rencana Jaringan Air Minum                                 |
| Lampiran IX      | : Peta Rencana Jaringan Persampahan                               |
| Lampiran X       | : Peta Rencana Jaringan Drainase                                  |
| Lampiran XI      | : Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya                         |
| Lampiran XII     | : Peta Rencana Pola Ruang   |
| Lampiran XIII    | : Program Prioritas Pemanfaatan Ruang                             |
| Lampiran XIV     | : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan                         |
| Lampiran XV      | : Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang                          |
| Lampiran XVI     | : Ketentuan Tata Bangunan   |
| Lampiran XVII    | : Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal                          |
| Lampiran XVIII   | : Ketentuan Khusus  |
| Lampiran XVIII.A | : Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan<br>: Bencana                |
| Lampiran XVIII.B | : Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi<br>: Bencana              |
| Lampiran XVIII.C | : Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian<br>: Pangan Berkelanjutan |
| Lampiran XVIII.D | : Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan                          |
| Lampiran XIX     | : Teknik Peraturan Zonasi   |

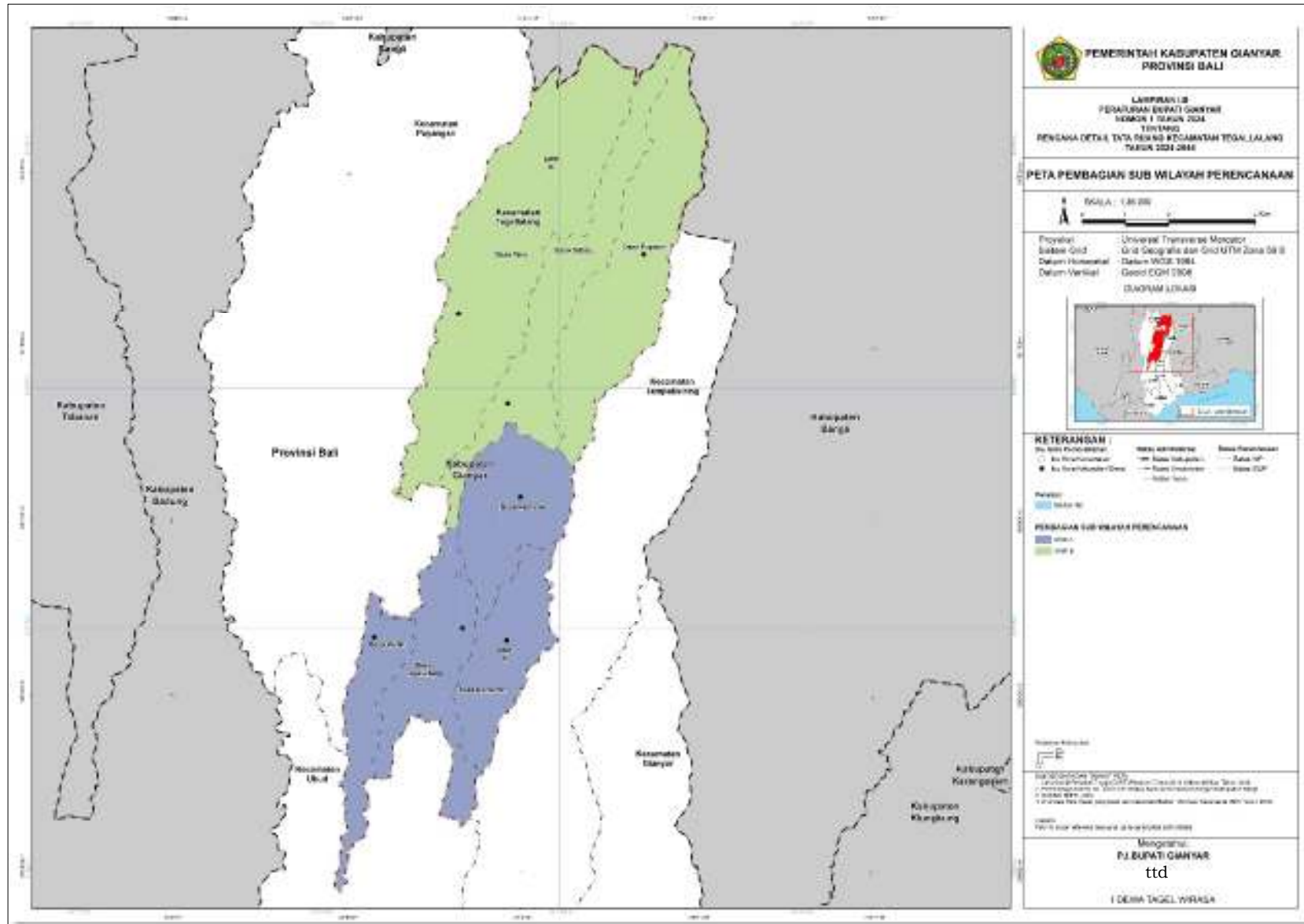
Lampiran I.A  
 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA ADMINISTRASI WILAYAH



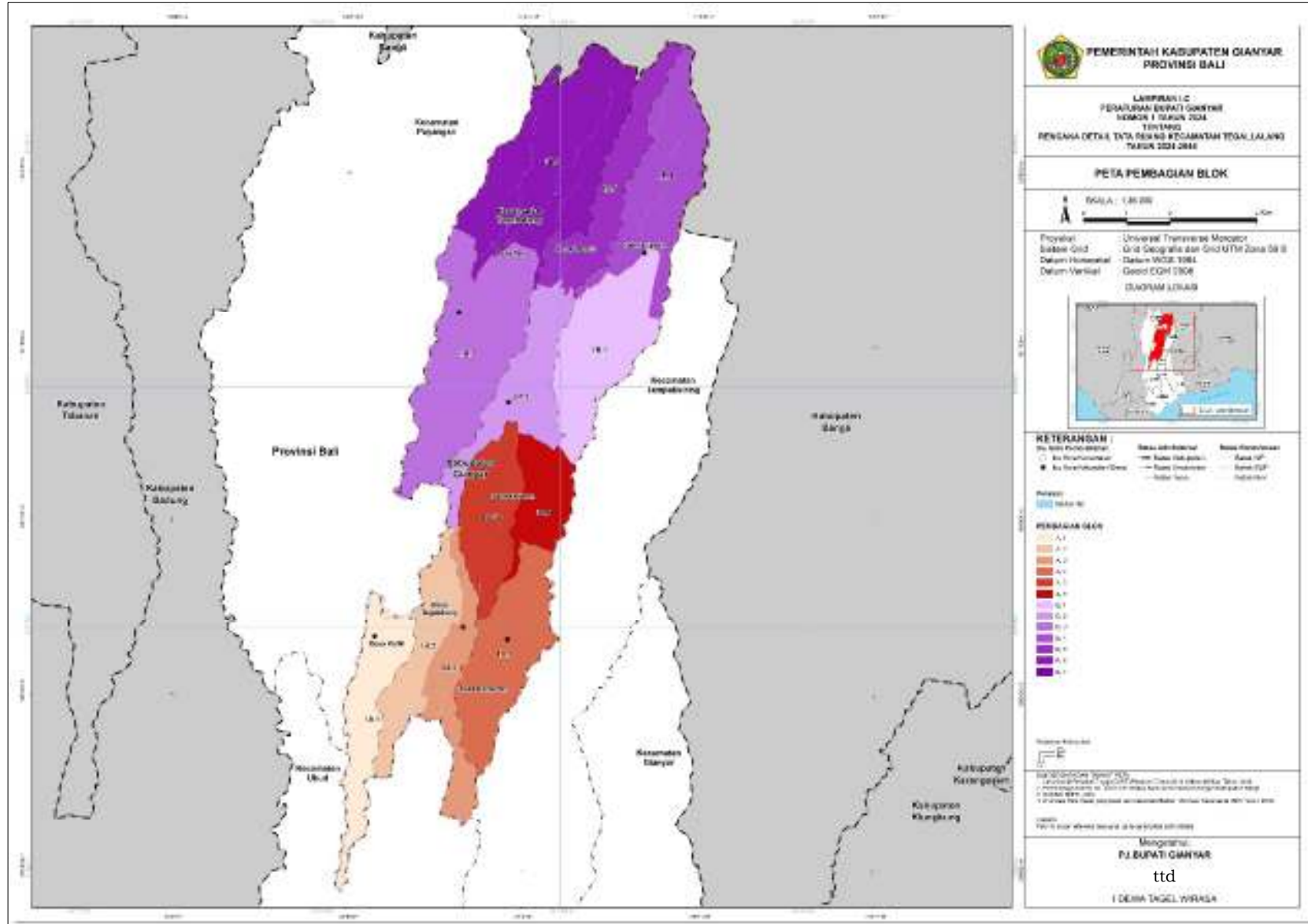
Lampiran I.B  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA PEMBAGIAN SWP



Lampiran I.C  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

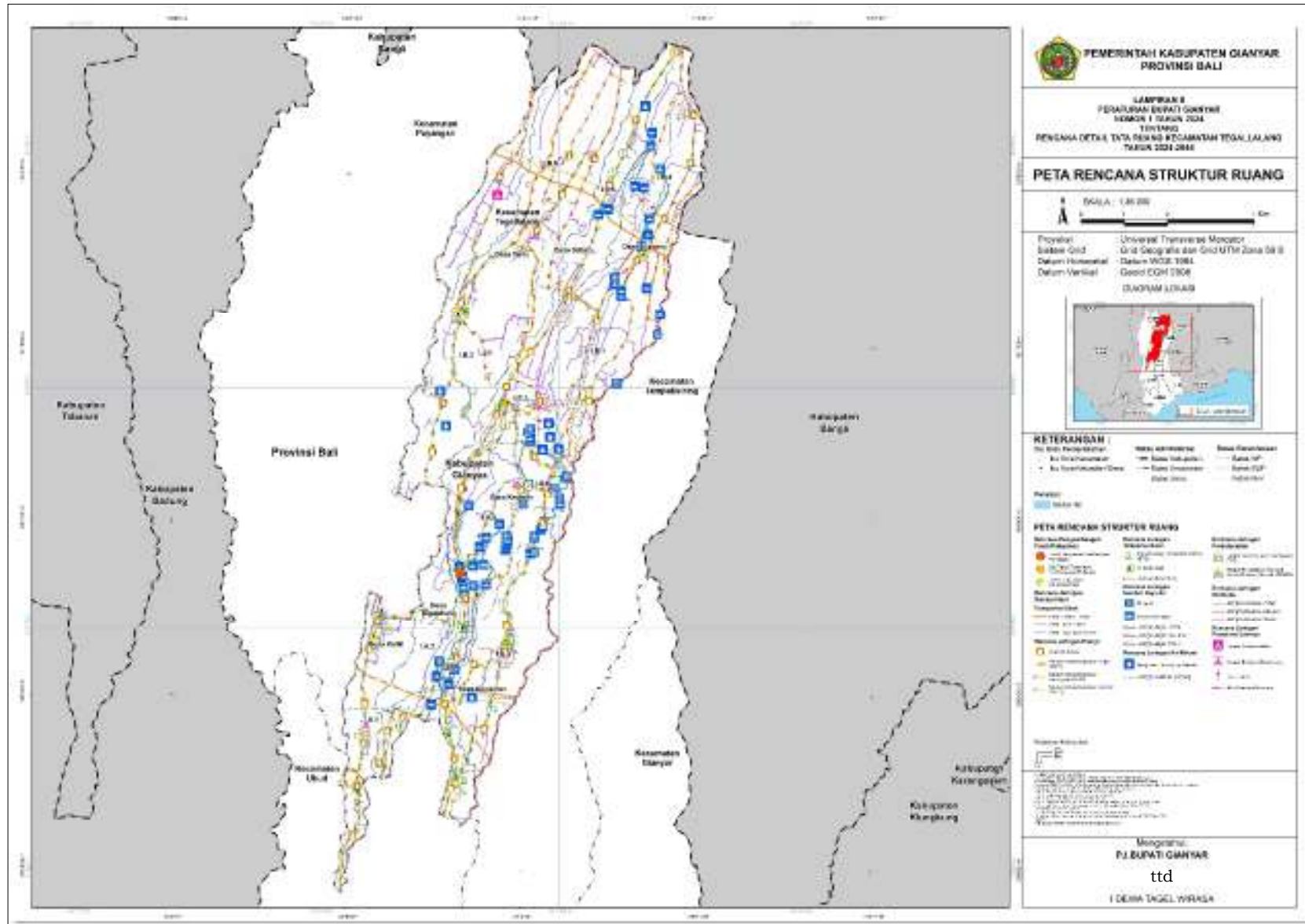
PETA PEMBAGIAN BLOK





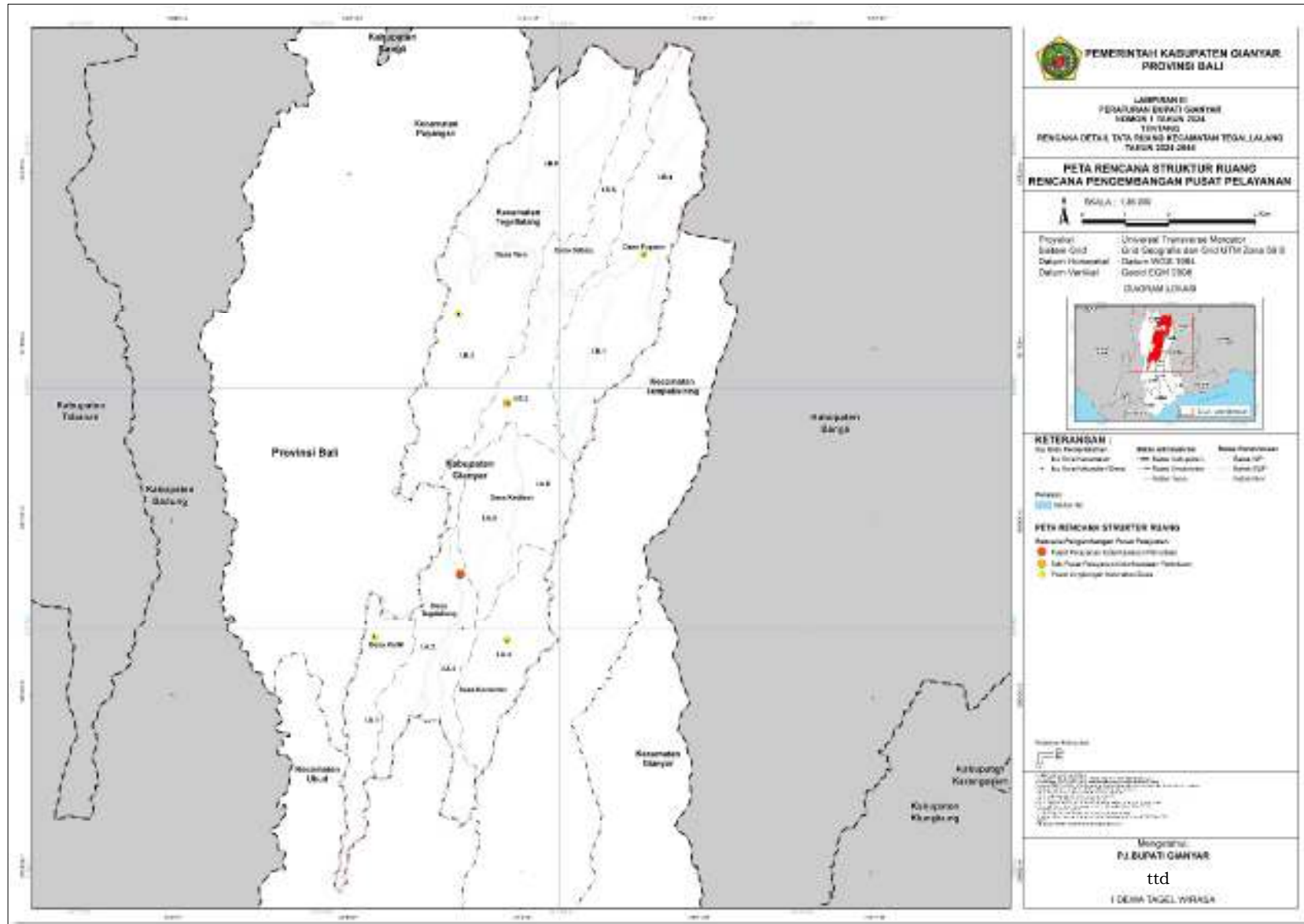
Lampiran II  
 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Lampiran III  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

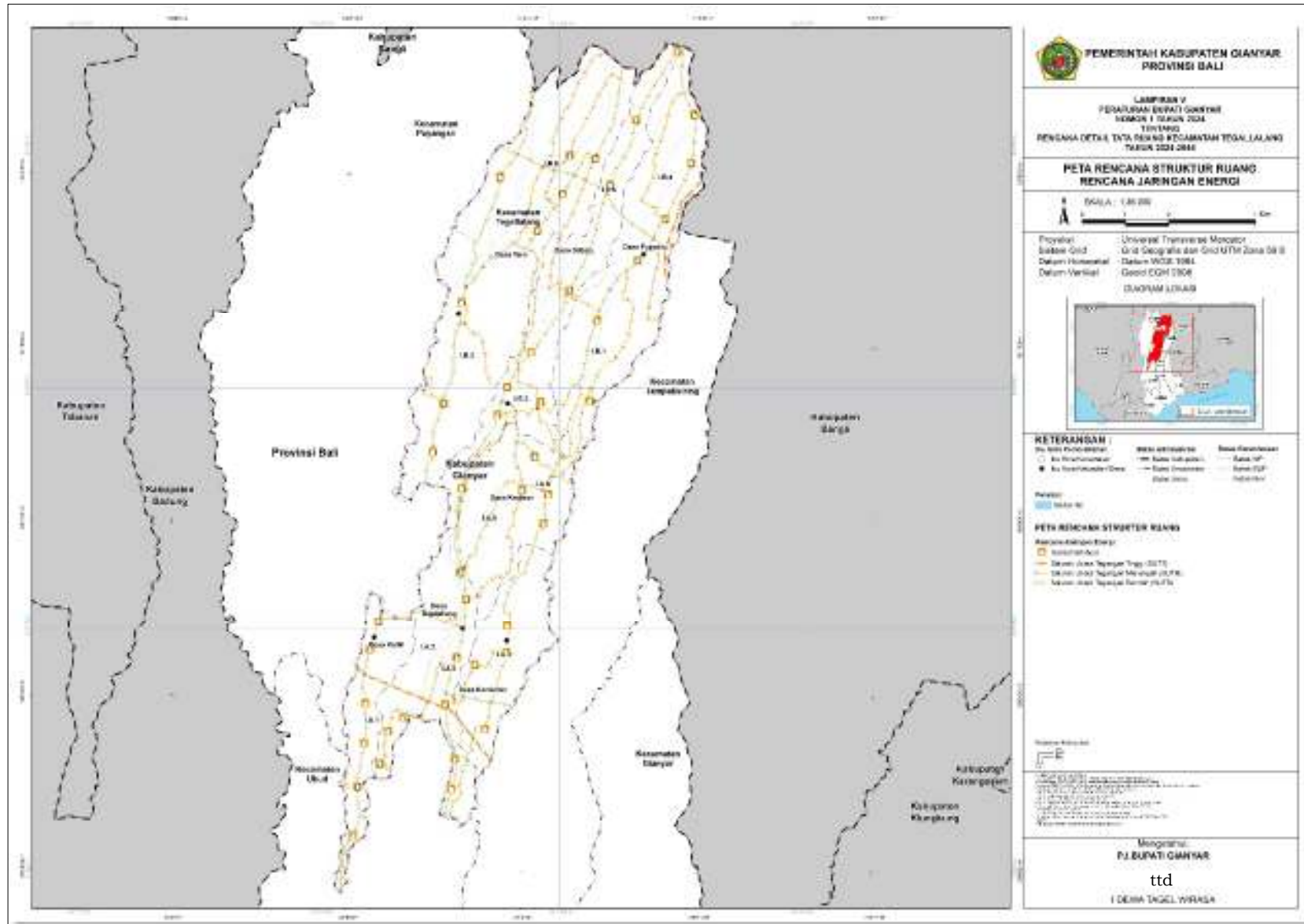
PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN





Lampiran V  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

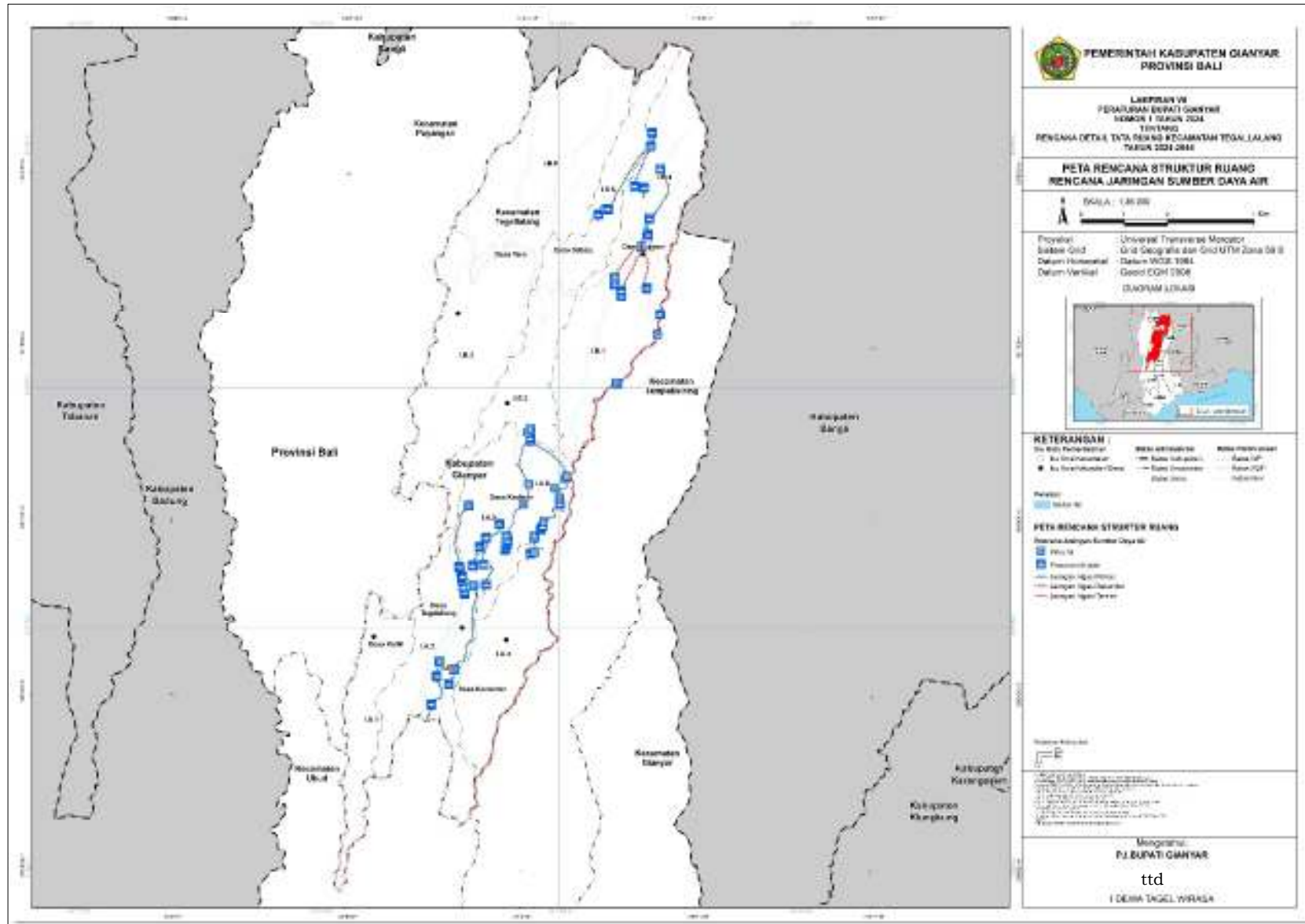
PETA RENCANA JARINGAN ENERGI





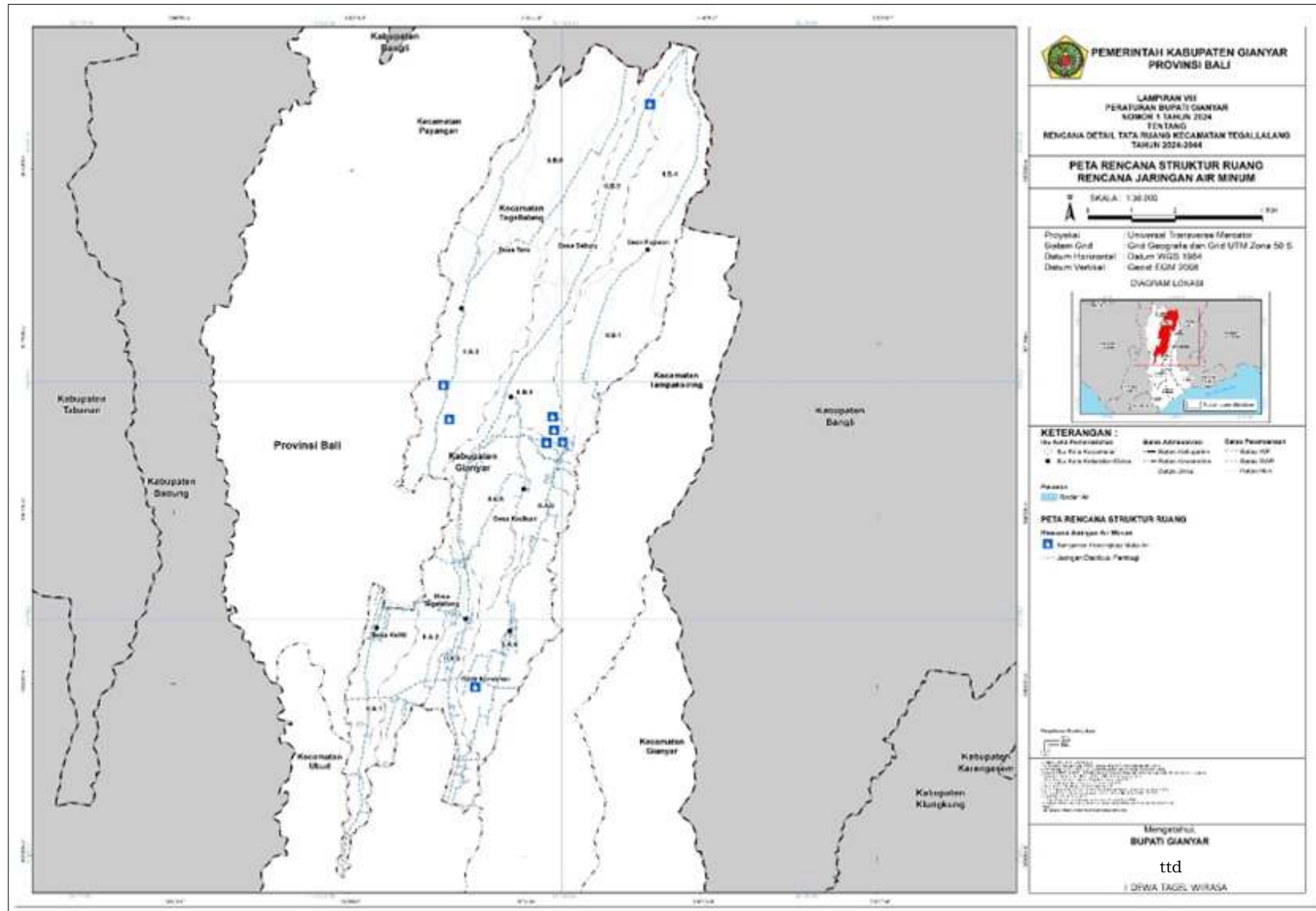
Lampiran VII  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

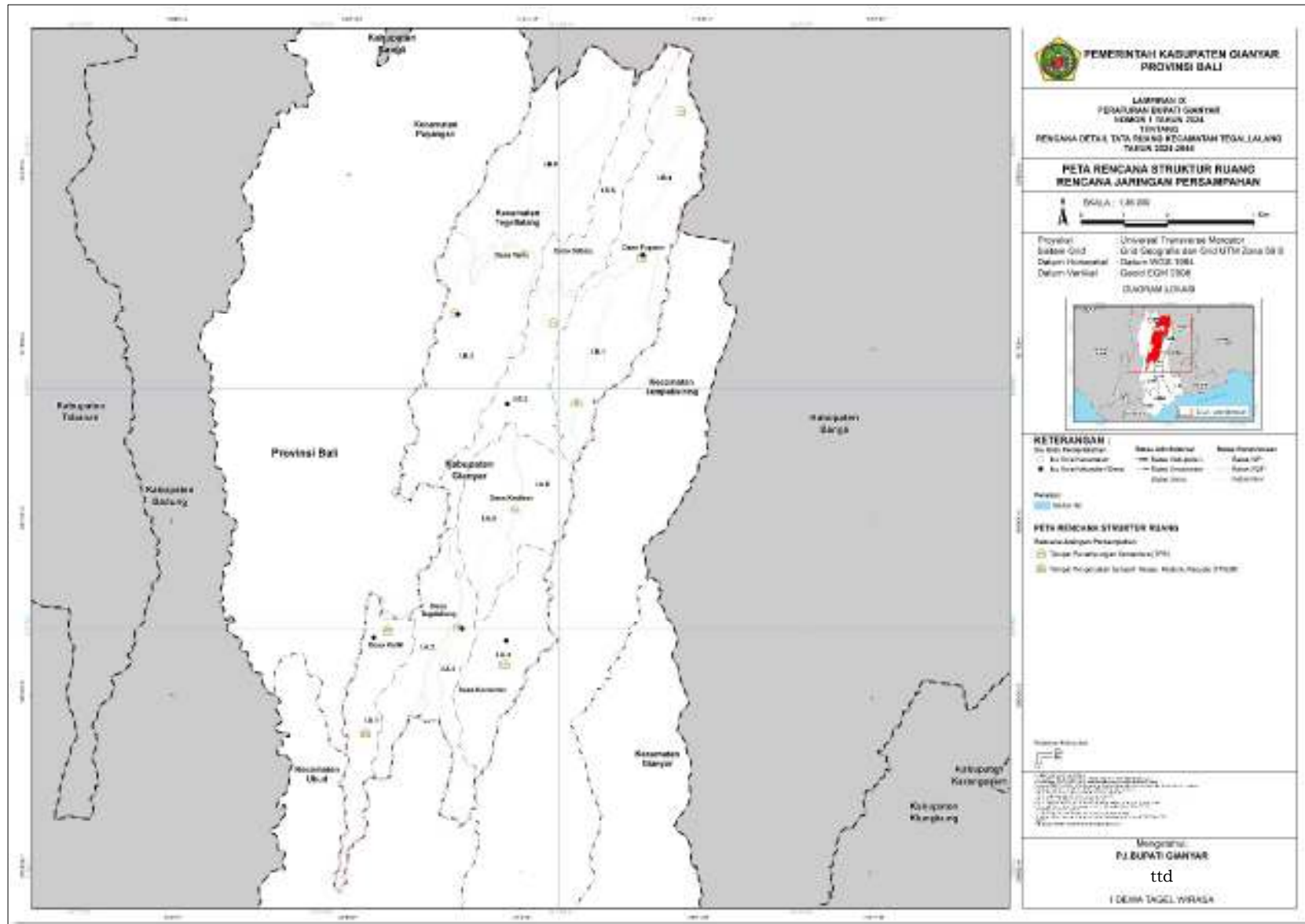


Lampiran VIII  
 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



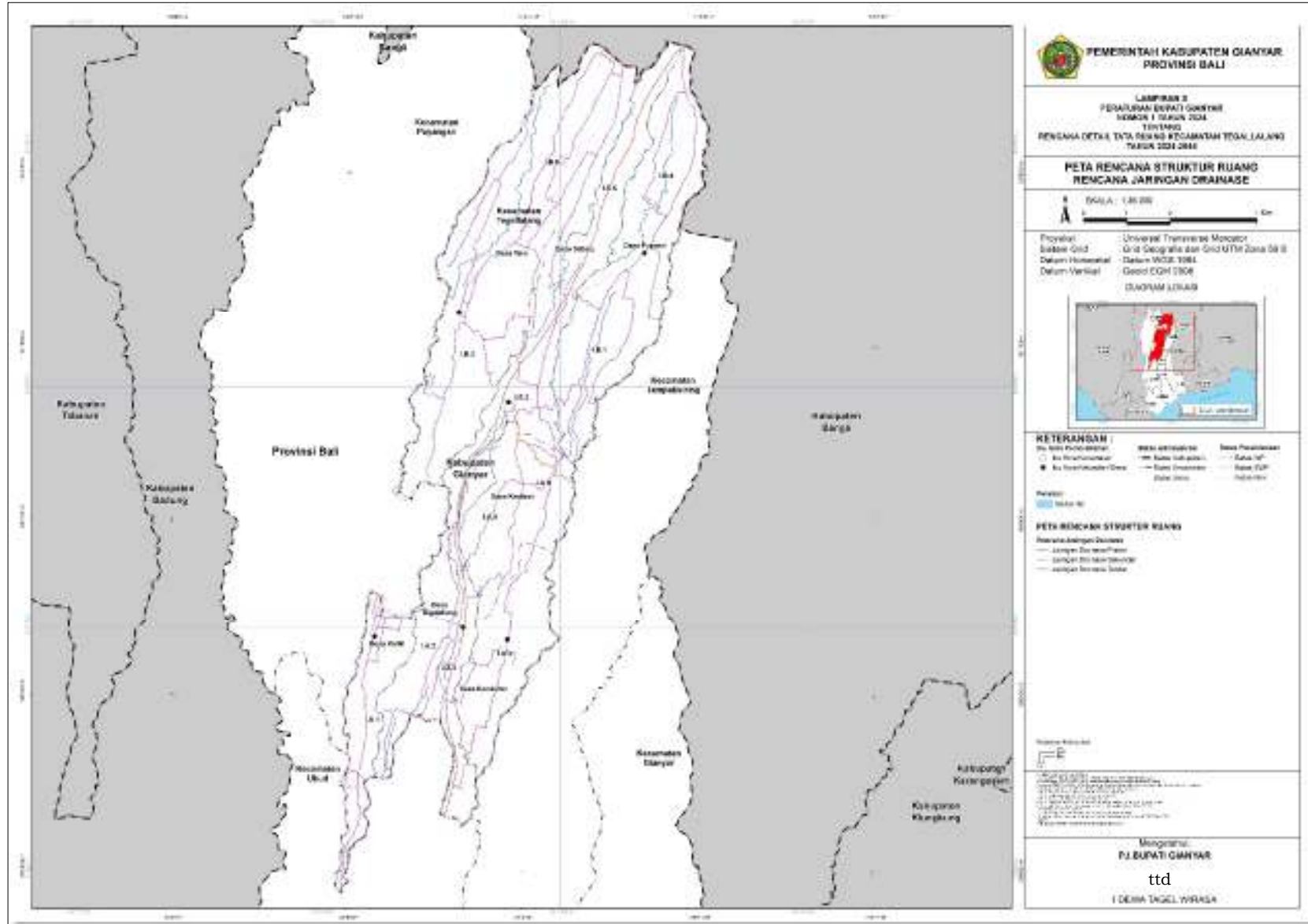
Lampiran IX  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044





Lampiran X  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

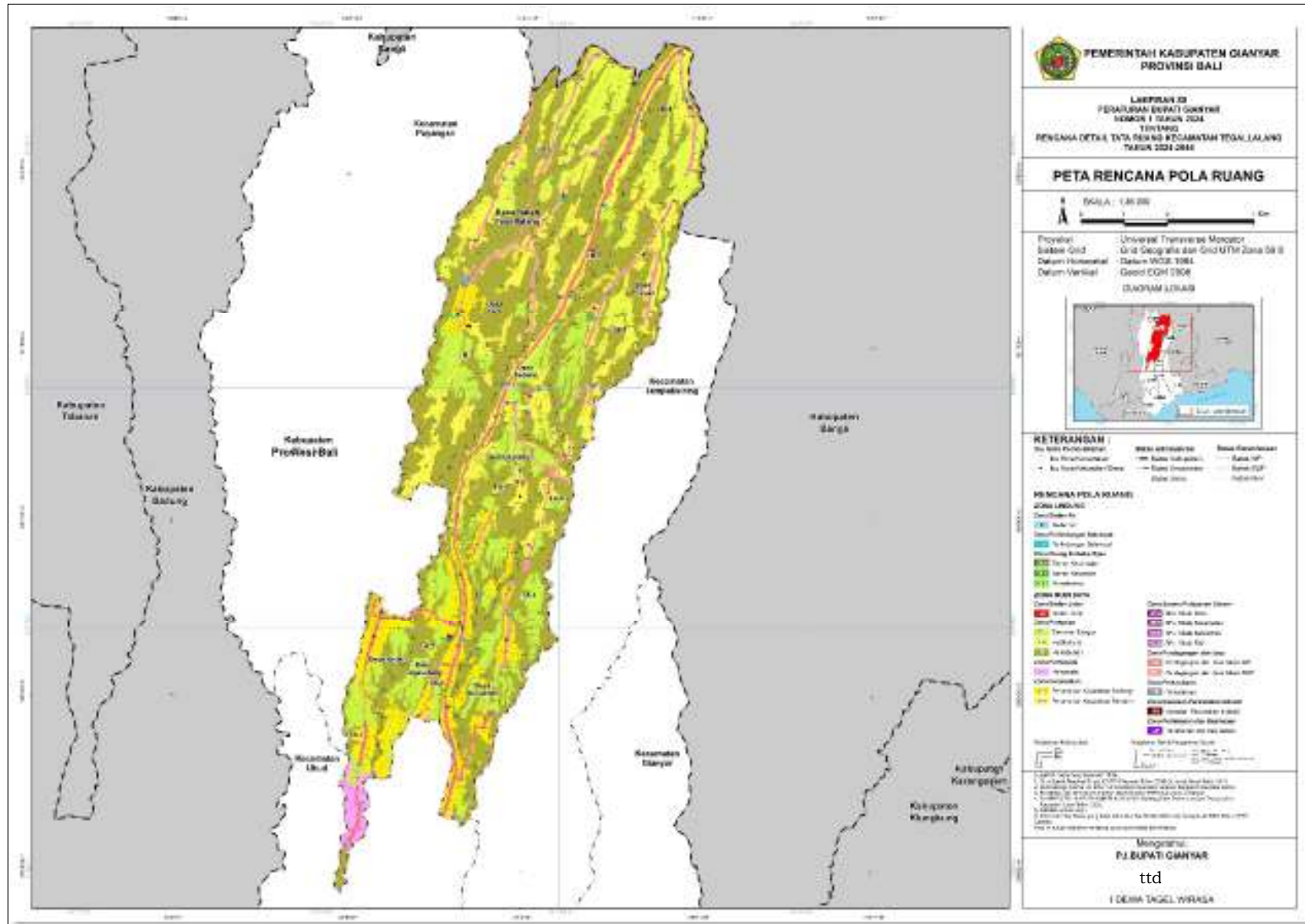
PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE





Lampiran XII  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

| No       | Program Prioritas   | Lokasi  | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |          |   |
|----------|---|---|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|----------|---|
|          |   |   | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |             |                    |          |   |
|          |   |   | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |             |                    |          |   |
| <b>I</b> | <b>Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>  |   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| <b>1</b> | <b>Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</b>  |   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| a.       | Pemantapan fungsi pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan  | SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| b.       | Peningkatan pelayanan pasar regional Tegallalang  | SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| c.       | Penataan koridor jaringan jalan pada sub pelayanan kawasan perkotaan                                | SWP B Blok I.B.2 di Desa Taro   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| d.       | Pemantapan fungsi pelayanan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan                              | SWP B Blok I.B.2 di Desa Taro   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| e.       | Penataan koridor jalan dan peningkatan pelayanan pada pusat lingkungan kelurahan/desa               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1;</li> <li>• Pusat lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4;</li> <li>• Pusat lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6;</li> <li>• Pusat lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan</li> <li>• Pusat lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| f.       | Pengembangan fasilitas publik masing-masing di Pusat dan Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP A Blok I.A.3 di Desa Tegallalang</li> <li>• Sub-pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan di SWP B Blok I.B.2 di Desa Sebatu</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| g.       | Peningkatan fungsi pelayanan lingkungan di setiap pusat lingkungan kelurahan/desa                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Keliki di SWP A Blok I.A.1;</li> <li>• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Kenderan di SWP A Blok I.A.4;</li> <li>• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Kedisan di SWP A Blok I.A.6;</li> <li>• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Pupuan di SWP B Blok I.B.1; dan</li> <li>• Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa Taro di SWP B Blok I.B.3</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| <b>2</b> | <b>Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi</b>   |   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    |          |   |
| a        | Pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jaringan jalan kolektor primer                           | Rencana jalan melintasi SWP B   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                    | APBD Kab | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No | Program Prioritas   | Lokasi   | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana                        | Instansi Pelaksana  |   |
|----|---|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---|---|
|    |   |  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |                                    |   |   |
|    |   |  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |                                    |   |   |
|    |   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    | Kabupaten Gianyar   |   |
| b  | Penataan jaringan jalan dengan fungsi kolektor primer dua (JKP-2) dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulpapan                        | Teges – Tegallalang – Bayung Gede terdapat pada SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    | APBD Prov. Bali   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali   |
| c  | Peningkatan dan Penataan jaringan jalan utama dengan fungsi kolektor primer tiga (JKP-3) dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Ulpapan | Tampaksiring – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    | APBD Prov. Bali   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali   |
| d  | Penaatan jaringan jalan dengan fungsi kolektor empat (JKP-4)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bayad – Tiingpuun terdapat pada SWP A dan SWP B;</li> <li>● Bayad-Manuaba – Gentong terdapat pada SWP A;</li> <li>● Belong - Bts. Bangli terdapat pada SWP B;</li> <li>● Belong – Tebuana terdapat pada SWP B;</li> <li>● Bilukan – Taro terdapat pada SWP B;</li> <li>● Jasan – Timbul terdapat pada SWP B;</li> <li>● Jl. Raya Bangkiang Sidem terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A;</li> <li>● Keliki-Sebali – Payogan terdapat pada SWP A;</li> <li>● Kutuh – Junjungan terdapat pada SWP A;</li> <li>● Manukaya – Calo terdapat pada SWP B;</li> <li>● Melinggih – Kelusa terdapat pada SWP A;</li> <li>● Taro - Pakuseba - Bts. Bangli terdapat pada SWP B;</li> <li>● Tegallalang – Kelusa terdapat pada SWP A;</li> <li>● Tegalpayang – Manukaya terdapat pada SWP B;</li> <li>● Timbul - Perean - Bts. Bangli terdapat pada SWP B;</li> <li>● Timbul-Tiingpuun – Calo terdapat pada SWP B;</li> <li>● Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung terdapat pada SWP A; dan</li> <li>● kolektor primer lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar. |   |
| e. | Penyusunan studi dan persetujuan lokasi untuk pengembangan jaringan jalan kolektor baru   | Rencana jalan melintasi SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    | APBN, APBD Prov. Bali, Instansi Swasta  | Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Instansi Swasta |
| f. | Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bukian – Tagtag terdapat pada SWP B;</li> <li>● Calo – Sebatu terdapat pada SWP B;</li> <li>● Jasan – Jati terdapat pada SWP B;</li> <li>● Jl. Bambu terdapat pada SWP B;</li> <li>● Jl. Duryadana terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Kelabang Moding Gg. Mangening terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Lanyahan terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Mawar terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Mawar Gg. I terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Mawar Gg. III terdapat pada SWP A;</li> <li>● Jl. Mawar Gg. IV terdapat pada SWP A;</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    | APBD Kab. Gianyar   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar  |

| No       | Program Prioritas   | Lokasi  | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana       | Instansi Pelaksana                                   |  |
|----------|---|---|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--|--|
|          |   |   | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |                   |  |  |
|          |   |   | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |                   |  |  |
|          |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Mawar Gg. V terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Nusa Sinta terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Pura Dalem Banjar Belong terdapat pada SWP B;</li> <li>Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Raya Bonjaka terdapat pada SWP B;</li> <li>Jl. Raya Desa Sentanu terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Raya Kenderan terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Raya Salak terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Suda Mala terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Sukaluwih terdapat pada SWP A;</li> <li>Kedisan – Bayad terdapat pada SWP A;</li> <li>Kedisan – Cebok – Tegallalang terdapat pada SWP A;</li> <li>Kedisan – Pakudui – Tegallalang terdapat pada SWP A dan SWP B;</li> <li>Kedisan – Tangkap – Tegallalang terdapat pada SWP A;</li> <li>Kelusa – Taro terdapat pada SWP B;</li> <li>Kerta – Buhu – Puakan terdapat pada SWP B;</li> <li>Let – Patas terdapat pada SWP B;</li> <li>Manuaba – Dukuh terdapat pada SWP A;</li> <li>Mumbi – Peraan terdapat pada SWP B;</li> <li>Sambahan – Kelabang – Moding terdapat pada SWP A;</li> <li>Sebatu – Bayad terdapat pada SWP A dan SWP B;</li> <li>Taro – Ked terdapat pada SWP B;</li> <li>Telepud – Sebatu – Bilukan terdapat pada SWP B;</li> <li>Timbul – Calo terdapat pada SWP B; dan</li> <li>jalan lokal lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |  |  |
| g.       | Pemeliharaan jaringan jalan dengan fungsi lingkungan primer   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jl. Mawar Gg. II terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Mawar Gg. VI terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Mawar Gg. VII terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Raya Bima terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Raya Desa Kenderan terdapat pada SWP A;</li> <li>Jl. Suda Mala terdapat pada SWP A; dan</li> <li>Jalan lingkungan lainnya terdapat pada SWP A dan SWP B.</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |  |
| h.       | Pembangunan jaringan jalan fungsi lingkungan primer baru pada zona permukiman baru                                  | SWP A dan SWP B   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| i.       | Penyusunan kajian mengenai pembangunan jalur serta stasiun LRT dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Uluwatu     | SWP A dan SWP B   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBN   | Kementerian Perhubungan                              |
| ii.      | Penyediaan moda transportasi berupa bus listrik serta sarana halte dalam upaya mendukung Kawasan Pariwisata Uluwatu | SWP A dan SWP B   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBN   | Kementerian Perhubungan                              |
| <b>3</b> | <b>Perwujudan Rencana Jaringan Energi</b>   |   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |  |  |
| a.       | Penyediaan papan informasi pada jalur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SUTT 150 kV Payangan – Gianyar terdapat pada SWP A</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBN, APBD Provinsi Bali,                            | Kementerian ESDM, Dinas                              |







| No        | Program Prioritas  | Lokasi   | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana | Instansi Pelaksana             |   |
|-----------|--|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---|
|           |  |  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |             |                                |   |
|           |  |  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |             |                                |   |
| d.        | Pemeliharaan jaringan drainase sekunder  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| e.        | Pemeliharaan jaringan drainase tersier   | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| <b>10</b> | <b>Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>                                   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| a.        | Penyediaan jalur evakuasi bencana  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| b.        | Penyediaan rambu titik kumpul  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.3; dan</li> <li>SWP B Blok I.B.3</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| c.        | Penyediaan rambu tempat evakuasi sementara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| d.        | Penyediaan rambu tempat evakuasi akhir   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan</li> <li>SWP B Blok I.B.6</li> </ul>  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| f.        | rencana penyediaan jaringan pejalan kaki baru mendukung kawasan pariwisata Tegallalang | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| <b>II</b> | <b>Program Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| <b>1</b>  | <b>Perwujudan Zona Lindung</b>   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| <b>A.</b> | <b>Zona Badan Air</b>  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| (i)       | Pemeliharaan fungsi zona badan air   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6,</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             | APBN, APBD Kab. Gianyar        | Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| (ii)      | pengelolaan hidrologi dan kualitas badan air   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6,</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             | APBN, APBD Kab. Gianyar        | Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| (iii)     | pengendalian pemanfaatan zona badan air sebagai pendukung kegiatan pariwisata          | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6,</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6,</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             | APBN, APBD Kab. Gianyar        | Kementerian Pekerjaan UMUm dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| <b>B.</b> | <b>Zona Perlindungan Setempat</b>  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             |                                |   |
| (i)       | Penetapan batas zona perlindungan setempat berupa kawasan tempat                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |             | APBD Kab. Gianyar, masyarakat, | Dinas Kebudayaan Kab.   |



| No        | Program Prioritas  | Lokasi   | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana                        | Instansi Pelaksana   |
|-----------|--|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
|           |  |  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |                                    |  |
|           |  |  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |                                    |  |
| (ix)      | Pemenuhan RTH Publik 3,42% pada zona budi daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan                  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    |  |
| <b>2</b>  | <b>Perwujudan Zona Budi Daya</b>   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    |  |
| <b>A.</b> | <b>Zona Badan Jalan</b>  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    |  |
| (i)       | Pemeliharaan fungsi zona badan jalan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| (ii)      | Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi zona badan jalan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| (iii)     | peningkatan fungsi zona badan jalan sebagai sistem jaringan transportasi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| <b>B.</b> | <b>Zona Pertanian</b>  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                                    |  |
| (i)       | Penetapan LP2B   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5</li> </ul>                         |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar                  | Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar                    |
| (ii)      | Pengembangan sub-zona pertanian tanaman pangan sebagai bagian atau mendukung kegiatan pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.</li> </ul>                        |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar                  | Dinas Pertanian Kab. Gianyar   |
| (iii)     | Pengembangan sub-zona hortikultura sebagai bagian kegiatan pariwisata                            | SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar                  | Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar                    |
| (iv)      | Pengembangan sub-zona perkebunan dalam upaya mendukung pariwisata Tegallalang                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar                  | Dinas Pertanian Kab. Gianyar   |
| (v)       | Pengawasan pada lahan-lahan yang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar                  | Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan   |

| No                        | Program Prioritas   | Lokasi   | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana       | Instansi Pelaksana  |  |
|---------------------------|---|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---|--|
|                           |   |  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |                   |   |  |
|                           |   |  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |                   |   |  |
|                           | ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar                                  |  |
| (vi)                      | Plasma nutfah sapi putih Bali   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Gianyar | Dinas Pertanian Kab. Gianyar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |  |
| <b>C. Zona Pariwisata</b> |   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| (i)                       | Penataan zona pariwisata  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4</li> <li>SWP B Blok I.B.2</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU  | Dinas Pariwisata Kab. Gianyar, Instansi Swasta |
| (ii)                      | Penyediaan informasi pelayanan publik pada zona pariwisata  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| (iii)                     | Penyediaan informasi rute dan jenis kegiatan wisata   |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| (iv)                      | Penataan bangunan – bangunan semi permanen yang melanggar kawasan hijau dan mengganggu view Ceking Rice Terrace dan Penataan Pedestrian Way Ceking Rice Terrace |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| (v)                       | Pengembangan zona RTH Publik pada zona pariwisata minimal 30% dari zona pariwisata  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| (vi)                      | Perwujudan dan Pengendalian DTW Alam  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.A.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
| 1                         | Penataan Kawasan DTW Ceking (Panorama)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU  | Dinas Pariwisata Kab. Gianyar                  |
| 2                         | Penataan Kawasan DTW Lembu Taro   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU  | Dinas Pariwisata Kab. Gianyar                  |
| (vii)                     | Perwujudan DTW Budaya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.2</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
|                           | Penataan Kawasan DTW Gunung Kawi Sebatu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.2</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar, Instansi Swasta atau KPBU  | Dinas Pariwisata Kab. Gianyar                  |
| (vii)                     | Perwujudan DTW Buatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   |   |  |
|                           | Penataan Kawasan DTW Wisata Gajah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok I.B.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |                   | APBD Kab. Gianyar,  | Dinas Pariwisata Kab. Gianyar                  |

| No   | Program Prioritas  | Lokasi   | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana                                | Instansi Pelaksana   |
|--|--|--|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|  |  |  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |  |  |
|  |  |  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |  |  |
|  |  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | Instansi Swasta atau KPBU                  |  |
| <b>D. Zona Kawasan Peruntukan Industri</b> |  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| (i)  | Penataan zona kawasan peruntukan industri  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| (ii)                                       | Penetapan batas pada zona kawasan peruntukan industri  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| (iii)                                      | Pengendalian limbah kegiatan pada zona kawasan peruntukan industri   | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.1</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| <b>E. Zona Perumahan</b>                   |  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| (i)  | Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman baru  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| (ii)                                       | Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan sedang | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>SWP B Blok I.B.3</li> </ul>   |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| (iii)                                      | Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat permukiman yang sudah ada meliputi sub-zona perumahan kepadatan rendah | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul>        |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| (iv)                                       | Pembatasan intensitas zona perumahan pada koridor jalan utama atau yang memiliki sifat komersil                                  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| (v)  | Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 35% dari zona perumahan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok I.A.1, I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan</li> <li>SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab.Ginyar, Instansi Swasta atau KPBU | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar, Instansi Swasta |
| <b>F. Zona Sarana Pelayanan Umum</b>       |  |  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| (i)  | Penyediaan fasilitas penyeberangan pada masing-masing zona pelayanan umum  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Ginyar                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar                  |
| (ii)                                       | Penyediaan ruang terbuka hijau di zona pelayanan umum  | SWP A dan SWP B  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBD Kab. Ginyar                           | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ginyar                  |



| No                                     | Program Prioritas   | Lokasi           | Waktu Pelaksanaan |            |      |      |      |      |               |               |               | Sumber Dana                              | Instansi Pelaksana                                   |
|--|---|------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|  |   |                  | Tahap I           | Tahapan II |      |      |      |      | Tahapan III   | Tahapan IV    | Tahapan V     |  |  |
|  |   |                  | 2024              | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 s/d 2034 | 2035 s/d 2039 | 2040 s/d 2044 |  |  |
| (iii)                                  | Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran                   |                  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| <b>I. Zona Pertahanan dan Keamanan</b> |   |                  |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |
| (i)                                    | Penetapan deliniasi zona pertahanan dan keamanan berupa Koramil 1616-06/Tegallalang | SWP B Blok I.B.2 |                   |            |      |      |      |      |               |               |               | APBN, APBD Prov. Bali, APBD Kab. Gianyar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gianyar |
| (ii)                                   | Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan                               | SWP B Blok I.B.2 |                   |            |      |      |      |      |               |               |               |  |  |

PJ BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA





























| NO.  | KODE & DIGIT KBLI | KEGIATAN   | ZONA LINDUNG       |                            |                                      |                                      |                    |                          |                         |                       |                    |                     |                                   |                                   |                                     |                                     | ZONA BUDI DAYA          |                                   |                              |                       |  |  |                            |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
|------|-------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|
|      |                   |  | Zona Badan Air     |                            | Zona Perindungan Sечат               |                                      |                    | Zona Ruang Terbuka Hijau |                         |                       | Zona Badan Jalan   |                     | Zona Pertanian                    |                                   |                                     | Zona Pariwisata                     |                         | Zona Kawasan Perindustri Industri |                              | Zona Perumahan        |  |  | Zona Sarana Pelayanan Umum |                                  |  |  | Zona Perdagangan dan Jasa |  | Zona Perkantoran |  | Zona Pertahanan dan Keamanan |  |
|      |                   |  | Sub-Zona Badan Air | Sub-Zona Perindungan Sечат | Sub-Zona Taman Keanekaragaman Hayati | Sub-Zona Taman Keanekaragaman Hayati | Sub-Zona Pemukiman | Sub-Zona Badan Jalan     | Sub-Zona Tanaman Pangan | Sub-Zona Hortikultura | Sub-Zona Perikanan | Sub-Zona Pariwisata | Zona Kawasan Perindustri Industri | Zona Kawasan Perindustri Industri | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | Sub-Zona SPU Skala Kota | Sub-Zona SPU Skala Kecamatan      | Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | Sub-Zona SPU Skala RW | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala CW P | Sub-Zona Perkantoran       | Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| BA   | PS                | RTS-2  | RTS-4              | RTS-7                      | SJ                                   | P-1                                  | P-2                | P-3                      | W                       | KPI                   | KPI                | P-3                 | B-4                               | SPU-1                             | SPU-2                               | SPU-3                               | SPU-4                   | K-2                               | K-3                          | RT                    | HK                                     |  |                            |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1159 | 50218             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENUMPANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1160 | 50219             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARABANGSA                             | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1161 | 50221             | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1162 | 50222             | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1163 | 50223             | ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAJA   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1164 | 50224             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTAR PROPINSI UNTUK BARANG  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1165 | 50225             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROPINSI UNTUK BARANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1166 | 50226             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTAR KABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1167 | 50227             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTAR KABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1168 | 50228             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1169 | 50229             | ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARABANGSA                                | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1170 | 51101             | ANGKUTAN UDARA NIAGA BERHADJAWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)       | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1171 | 51102             | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERHADJAWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY) | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1172 | 51103             | ANGKUTAN UDARA NIAGA BERHADJAWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)        | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1173 | 51104             | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERHADJAWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1174 | 51105             | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERHADJAWAL LAINNYA (SINGLE MAJORITY)   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1175 | 51106             | ANGKUTAN UDARA UNTUK OLARAHAGA   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1176 | 51107             | ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1177 | 51109             | ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1178 | 51202             | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERHADJAWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)                              | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1179 | 51203             | ANGKUTAN UDARA NIAGA BERHADJAWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)                                     | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1180 | 51204             | ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERHADJAWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)                               | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1181 | 52101             | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1182 | 52102             | AKTIVITAS COLD STORAGE   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1183 | 52103             | AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERBATAS  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1184 | 52104             | PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1185 | 52105             | AKTIVITAS PENYIMPANAN  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1186 | 52106             | FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER BAHAN PANGON  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1187 | 52107             | PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIAL BUBUNG                                | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1188 | 52108             | PENGOLAHAN GUDANG SISTEM KESI GUDANG   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1189 | 52109             | PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T                                 | T, B                              | T, B                                | T                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1190 | 52211             | AKTIVITAS TERMINAL DARAT   | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1191 | 52212             | AKTIVITAS STASUSI KERETA API   | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1192 | 52213             | AKTIVITAS JALAN TOL  | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1193 | 52214             | AKTIVITAS PERPAKARAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)  | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1194 | 52215             | AKTIVITAS PERPAKARAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)  | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1195 | 52219             | AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA   | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1196 | 52221             | AKTIVITAS PELAYANAN KEPERLABAHAN LAUT  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1197 | 52222             | AKTIVITAS PELAYANAN KEPERLABAHAN SUNGAI DAN DANAU  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1198 | 52223             | AKTIVITAS PELAYANAN KEPERLABAHAN PENYEBERANGAN   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1199 | 52224             | AKTIVITAS PELABAHAN PERKERANAN   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1200 | 52225             | AKTIVITAS PENGOLAHAN KAPAL   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1201 | 52229             | AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1202 | 52231             | AKTIVITAS KEKABANJARAN   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1203 | 52232             | JASA PELAYANAN NAVIGASI PERBERANGAN (SINGLE PURPOSE)   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1204 | 52240             | PENANGANAN KARGO BERUNDIR MUAT BARANG  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | X                                 | T, B                              | T, B                                | T, B                                | X                       | T, B                              | X                            | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1205 | 52291             | JASA PENGOLAHAN TRANSPORTASI LAUT  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1206 | 52292             | AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & DAM)                                | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1207 | 52293             | AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1208 | 52294             | AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | X                     | X                  | X                   | X                                 | X                                 | X                                   | X                                   | X                       | X                                 | X                            | X                     | X                                      | X  | X                          |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1209 | 52295             | ANGKUTAN MULTIMODA   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1210 | 52296             | JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1211 | 52297             | JASA KAWASAN KAPAL JAGAN KEPERKAPALAN PERUMAHAN PELAYARAN  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1212 | 52298             | AKTIVITAS TALLY MANDIRI  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1213 | 52299             | AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL  | X                  | X                          | T, B                                 | T, B                                 | X                  | X                        | T                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1214 | 53100             | AKTIVITAS POS  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1215 | 53201             | AKTIVITAS KURIR  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1216 | 53202             | AKTIVITAS AGRO KURIR   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | T, B                                | T, B                    | T, B                              | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1217 | 55110             | HOTEL BENTANG  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1218 | 55120             | HOTEL MELATI   | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T, B                                     | T, B                       |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |
| 1219 | 55130             | PONDOK WISATA  | X                  | X                          | X                                    | X                                    | X                  | X                        | X                       | T, B                  | T, B               | T, B                | T, B                              | T, B                              | T, B                                | X                                   | T, B                    | X                                 | T, B                         | T, B                  | T, B                                   | T,                                       |                            |                                  |  |  |                           |  |                  |  |                              |  |













| NO.  | KODE 5 DIGIT KBLI | KEGIATAN   | ZONA DAN SUBZONA | ZONA LINDUNG       |                                |                            |                         |                           |                         |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | ZONA BUDI DAYA           |                                  |                          |                          |                          |                            |                          |                          |                          |                           |                          |                          |                          |                              |                          |                          |                          |
|------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      |                   |  |                  | Zona Badan Air     |                                | Zona Perlintasan Ekstranet |                         | Zona Ruang Terbuka Hijau  |                         |                         |                          | Zona Badan Jalan         |                          | Zona Pertanian           |                          |                          | Zona Pariwisata          |                          | Zona Kawasan Peruntukan Industri |                          | Zona Perumahan           |                          | Zona Sarana Pelayanan Umum |                          |                          |                          | Zona Perdagangan dan Jasa |                          | Zona Perkantoran         |                          | Zona Pertahanan dan Keamanan |                          |                          |                          |
|      |                   |  |                  | Sub-Zona Badan Air | Sub-Zona Perlintasan Ekstranet | Sub-Zona Taman Perumahan   | Sub-Zona Taman Industri | Sub-Zona Taman Pertamanan | Sub-Zona Taman Olahraga | Sub-Zona Taman Rekreasi | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan         | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan   | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan  | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan     | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan |
|      |                   |  |                  | BA                 | PE                             | RTK-3                      | RTK-4                   | RTK-7                     | RTK-8                   | RTK-9                   | RTK-10                   | RTK-11                   | RTK-12                   | RTK-13                   | RTK-14                   | RTK-15                   | RTK-16                   | RTK-17                   | RTK-18                           | RTK-19                   | RTK-20                   | RTK-21                   | RTK-22                     | RTK-23                   | RTK-24                   | RTK-25                   | RTK-26                    | RTK-27                   | RTK-28                   | RTK-29                   | RTK-30                       | RTK-31                   | RTK-32                   |                          |
|      |                   |  |                  | Sub-Zona Badan Air | Sub-Zona Perlintasan Ekstranet | Sub-Zona Taman Perumahan   | Sub-Zona Taman Industri | Sub-Zona Taman Pertamanan | Sub-Zona Taman Olahraga | Sub-Zona Taman Rekreasi | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan         | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan   | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan  | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan     | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan | Sub-Zona Taman Perumahan |
| 1748 | 93232             | TAMAN REKREASI / TAMAN WISATA  | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | X                        | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1749 | 93233             | KOLAM PEMANCINGAN  | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | X                        | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1750 | 93239             | DANA TABUNG WISATA BUATAN / BINAAN MANUSIA LAINNYA   | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | X                        | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1751 | 93241             | ARGUNG JERAM   | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | X                        | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1752 | 93242             | WISATA SELAM   | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | X                        | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1753 | 93243             | DERMAGA MARINA   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1754 | 93244             | KOLAM PEMANCINGAN  | X                | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1755 | 93245             | WISATA MEMANCING   | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1756 | 93246             | AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINNYA                                | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1757 | 93249             | WISATA TIRTA LAINNYA   | T, B             | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |
| 1758 | 93291             | KLUB MALAM   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1759 | 93292             | KARAOKE  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1760 | 93293             | USAHA ARSNA PERMAINAN  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1761 | 93294             | DISKOTEK   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1762 | 93299             | AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1763 | 94110             | AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1764 | 94121             | AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1765 | 94122             | AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1766 | 94200             | AKTIVITAS ORGANISASI BURUH   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1767 | 94910             | AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1768 | 94920             | AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1769 | 94990             | AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1770 | 95110             | REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SILIKONISNYA   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1771 | 95120             | REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1772 | 95210             | REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMSI   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1773 | 95220             | REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1774 | 95230             | REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1775 | 95240             | REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1776 | 95291             | AKTIVITAS VERBAH PAKAIAN   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1777 | 95299             | REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LAINNYA   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1778 | 96111             | AKTIVITAS PANGRAS RAMBUT   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1779 | 96112             | AKTIVITAS SALON KECANTIKAN   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1780 | 96121             | RUMAH PLAT   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1781 | 96122             | AKTIVITAS SPA  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1782 | 96129             | AKTIVITAS KESEHATAN LAINNYA  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1783 | 96200             | AKTIVITAS PENYATU  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1784 | 96910             | AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YEBI  | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1785 | 96990             | AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1786 | 97000             | AKTIVITAS RUMAH TANGGA BERBENTUK POMPOSI KERJA DIRI PERSONIL DOMESTIK                                | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1787 | 98100             | AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLAH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1788 | 98200             | AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLAH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1789 | 99000             | AKTIVITAS BIDAN INTERNASIONAL DAN BIDAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA                                 | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1790 |                   | RUMAH TINGGAL PERIBADI   | X                | X                  | X                              | X                          | X                       | X                         | X                       | X                       | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                        | X                                | X                        | X                        | X                        | X                          | X                        | X                        | X                        | X                         | X                        | X                        | X                        | X                            |                          |                          |                          |
| 1791 |                   | GEDUNG KANTOR PEMERINTAH   | X                | X                  | T, B                           | T, B                       | X                       | X                         | T, B                    | T, B                    | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                             | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                       | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                      | T, B                     | T, B                     | T, B                     | T, B                         |                          |                          |                          |

Keterangan

- I** Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan/Diizinkan
- T** Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diizinkan Terbatas
  - Pembatasan waktu pengoperasian dan jangka waktu pemanfaatan lahan
  - Pembatasan luas pemanfaatan ruang atau proporsi pemanfaatan ruang dalam subzona
  - Pembatasan jumlah pemanfaatan
- B** Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diizinkan dengan Bersyarat Tertentu
  - Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang ditetapkan diluar ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
- X** Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diizinkan

PJ. BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

| NO       | ZONA/ SUB-ZONA                          | KODE       | INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG |          |         |          |                    | KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA |
|----------|---|------------|------------------------------|----------|---------|----------|--------------------|--|
|          |   |            | KDB MAKS                     | KLB MAKS | KDH MIN | KTB MAKS | LUAS KAVELING MIN  |  |
| <b>A</b> | <b>ZONA LINDUNG</b>                     |            |                              |          |         |          |                    |  |
| <b>1</b> | <b>Zona Badan Air</b>                   | <b>BA</b>  | -                            | -        | -       | -        | -                  | -  |
| <b>2</b> | <b>Zona Perlindungan Setempat</b>       | <b>PS</b>  | 50%                          | 1,0      | 40%     | -        | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>3</b> | <b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>         | <b>RTH</b> |                              |          |         |          |                    |  |
| a        | Sub-Zona Taman Kecamatan                | RTH-3      | 30%                          | 0,6      | 60%     | 30%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| b        | Sub-Zona Taman Kelurahan                | RTH-4      | 30%                          | 0,6      | 60%     | 30%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| c        | Sub-Zona Pemakaman                      | RTH-7      | 30%                          | 0,6      | 60%     | -        | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>B</b> | <b>ZONA BUDI DAYA</b>                   |            |                              |          |         |          |                    |  |
| <b>1</b> | <b>Zona Badan Jalan</b>                 | <b>BJ</b>  | -                            | -        | -       | -        | -                  | -  |
| <b>2</b> | <b>Zona Pertanian</b>                   | <b>P</b>   |                              |          |         |          |                    |  |
| a        | Sub-Zona Tanaman Pangan                 | P-1        | 20%                          | 0,8      | 40%     | 20%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| b        | Sub-Zona Hortikultura                   | P-2        | 30%                          | 1,2      | 30%     | 30%      | 100 m <sup>2</sup> | Taman telajakan min. 1 m                       |
| c        | Sub-Zona Perkebunan                     | P-3        | 40%                          | 1,6      | 30%     | 80%      | 100 m <sup>2</sup> | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>3</b> | <b>Zona Pariwisata</b>                  | <b>W</b>   | 60%                          | 2,4      | 30%     | 120%     | 100 m <sup>2</sup> | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>4</b> | <b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b> | <b>KPI</b> | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>5</b> | <b>Zona Perumahan</b>                   | <b>R</b>   |                              |          |         |          |                    |  |
| a        | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang     | R-3        | 60%                          | 2,4      | 30%     | 60%      | 100 m <sup>2</sup> | Taman telajakan min. 1 m                       |
| b        | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah     | R-4        | 60%                          | 2,4      | 30%     | 60%      | 100 m <sup>2</sup> | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>6</b> | <b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>       | <b>SPU</b> |                              |          |         |          |                    |  |
| a        | Sub-Zona SPU Skala Kota                 | SPU-1      | 60%                          | 2,4      | 20%     | 120%     | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| b        | Sub-Zona SPU Skala Kecamatan            | SPU-2      | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| c        | Sub-Zona SPU Skala Kelurahan            | SPU-3      | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |
| d        | Sub-Zona SPU Skala RW                   | SPU-4      | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                  | Taman telajakan min. 1 m                       |

| NO       | ZONA/ SUB-ZONA                          | KODE      | INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG |          |         |          |                   | KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG LAINNYA |
|----------|---|-----------|------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|--|
|          |   |           | KDB MAKS                     | KLB MAKS | KDH MIN | KTB MAKS | LUAS KAVELING MIN |  |
| <b>7</b> | <b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>        | <b>K</b>  |                              |          |         |          |                   |  |
| a        | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP  | K-2       | 60%                          | 2,4      | 20%     | 120%     | -                 | Taman telajakan min. 1 m                       |
| b        | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3       | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                 | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>8</b> | <b>Zona Perkantoran</b>                 | <b>KT</b> | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                 | Taman telajakan min. 1 m                       |
| <b>9</b> | <b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>     | <b>HK</b> | 60%                          | 2,4      | 20%     | 60%      | -                 | Taman telajakan min. 1 m                       |

PJ. BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

| Zona/Sub Zona                       | Kode  | Tata Bangunan       |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   | Tampilan Bangunan   |
|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------|-------------------|---|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|---|
|                                     |       | TB Maksimum (meter) |              |                   | GSB (Meter)                                 |   |   | Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m) |              |                   | JBS Minimum (m) |              |                   | JBB Minimum (m) |              |                   |   |
|                                     |       | Kolektor Primer     | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer                             | Lokal Primer                                | Lingkungan Primer                           | Kolektor Primer                        | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer |   |
| <b>I. Zona Lindung</b>              |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| A. Badan Air                        | BA    | -                   | -            | -                 | -   | -   | -   | -                                      | -            | -                 | -               | -            | -                 | -               | -            | -                 | -   |
| B. Perlindungan Setempat            | PS    | 15                  | 15           | 15                | -   | -   | -   | -                                      | -            | -                 | -               | -            | -                 | -               | -            | -                 | -   |
| <b>C. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b> |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Taman Kecamatan                     | RTH-3 | 15                  | 15           | 15                | 6   | 4,5   | 4   | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | -   |
| Taman Kelurahan                     | RTH-4 | 15                  | 15           | 15                | 6   | 4,5   | 4   | -                                      | 2            | 1                 | -               | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | -   |
| Pemukaman                           | RTH-7 | 15                  | 15           | 15                | -   | 4,5   | 4   | -                                      | 2            | 1                 | -               | 1            | 0,5               | -               | 1            | 0,5               | -   |
| <b>II. Zona Budi Daya</b>           |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| <b>Zona Badan Jalan (BJ)</b>        |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Badan Jalan                         | BJ    | -                   | -            | -                 | -   | -   | -   | -                                      | -            | -                 | -               | -            | -                 | -               | -            | -                 | -   |
| <b>Zona Pertanian (P)</b>           |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Tanaman Pangan                      | P-1   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| Hortikultura                        | P-2   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| Perkebunan                          | P-3   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| <b>Zona Pariwisata (W)</b>          |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Pariwisata                          | W     | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 2                                      | 1            | 0,5               | -               | 1            | 0,5               | -               | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |

| Zona/Sub Zona                                 | Kode  | Tata Bangunan       |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   | Tampilan Bangunan   |
|---|-------|---------------------|--------------|-------------------|---|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|---|
|   |       | TB Maksimum (meter) |              |                   | GSB (Meter)                                   |   |   | Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m) |              |                   | JBS Minimum (m) |              |                   | JBB Minimum (m) |              |                   |   |
|   |       | Kolektor Primer     | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer                               | Lokal Primer                                  | Lingkungan Primer                                     | Kolektor Primer                        | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer |   |
|   |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   | dan pada zona perlindungan setempat agar memperhatikan kondisi tanah dan kerawanan gerakan tanah                                |
| <b>Zona Peruntukan Kawasan Industri (KPI)</b> |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Zona Peruntukan Kawasan Industri              | KPI   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter           | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| <b>Zona Perumahan (R)</b>                     |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| Perumahan Kepadatan Sedang                    | R-3   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter         | 1                                      | 0,5          | 0,5               | 1               | 0,5          | 0,5               | 1               | 0,5          | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| Perumahan Kepadatan Rendah                    | R-4   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah minimum 0,5 meter | 1                                      | 0,5          | 0,5               | 1               | 0,5          | 0,5               | 1               | 0,5          | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| <b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>       |       |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| SPU Skala Kota                                | SPU-1 |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |   |
| SPU Skala Kecamatan                           | SPU-2 | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter           | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| SPU Skala Kelurahan                           | SPU-3 | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter           | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |
| SPU Skala RW                                  | SPU-4 | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter   | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter           | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan  |

| Zona/Sub Zona                            | Kode | Tata Bangunan       |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |  |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---|---|---|--|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
|  |      | TB Maksimum (meter) |              |                   | GSB (Meter)                                 |   |   | Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal (m) |              |                   | JBS Minimum (m) |              |                   | JBB Minimum (m) |              |                   | Tampilan Bangunan  |
|  |      | Kolektor Primer     | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer                             | Lokal Primer                                | Lingkungan Primer                           | Kolektor Primer                        | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer | Kolektor Primer | Lokal Primer | Lingkungan Primer |  |
|  |      |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |  |
| <b>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>     |      |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |  |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP            | K-2  | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 1                                      | -            | -                 | 1               | -            | -                 | 1               | -            | -                 | Mencermin budaya dan arsitektur bali   |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP           | K-3  | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | -                                      | -            | -                 | -               | -            | -                 | -               | -            | -                 | Mencermin budaya dan arsitektur bali   |
| <b>Zona Perkantoran (KT)</b>             |      |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |  |
| Perkantoran                              | KT   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Tampilan bangunan mengikuti mencerminkan budaya bali dan konstruksi yang dapat menahan gempa atau gerakan tanah                |
| <b>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</b> |      |                     |              |                   |   |   |   |  |              |                   |                 |              |                   |                 |              |                   |  |
| Pertahanan dan Keamanan                  | HK   | 15                  | 15           | 15                | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter | 3                                      | 2            | 1                 | 1,5             | 1            | 0,5               | 1,5             | 1            | 0,5               | Mencermin budaya dan arsitektur bali pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan kontruksi tahan gempa bumi atau gerakan tanah |

PJ BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Lampiran XVII  
 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| Zona/Sub Zona         | Kode  | Prasarana dan Sarana Minimal  |
|-----------------------|-------|---|
| Badan Air             | BA    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan/adat;</li> <li>2. Tersedia pengaturan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;</li> <li>3. Bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;</li> <li>4. Lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah; dan</li> <li>5. Pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan dini bencana.</li> </ol>  |
| Perlindungan Setempat | PS    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman, dan manual)</li> <li>2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai</li> <li>4. Tersedianya tempat sampah</li> </ol>   |
| Taman Kecamatan       | RTH-3 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki</li> <li>6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel</li> <li>7. Tersedia tempat sampah</li> </ol>   |
| Taman Kelurahan       | RTH-4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>5. Tersedia akses jaringan pejalan kaki</li> <li>6. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel</li> <li>7. Tersedia tempat sampah</li> </ol>   |
| Pemakaman             | RTH-7 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia sarana dan prasarana peribadatan untuk aktivitas pemakaman</li> <li>2. Tersedianya ruang kegiatan untuk prosesi kegiatan keagamaan</li> <li>3. Tersedianya papan informasi pemakaman</li> <li>4. Tersedianya akses jaringan jalan di dalam zona pemakaman</li> <li>5. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>6. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>7. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> </ol> |



| Zona/Sub Zona               | Kode | Prasarana dan Sarana Minimal  |
|-----------------------------|------|---|
|                             |      | 8. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul<br>9. Tersedia akses jaringan pejalan kaki<br>10. Tersedia jaringan kebutuhan untuk difabel<br>11. Tersedia tempat sampah   |
| Badan Jalan                 | BJ   | 1. Jalan pedestrian yang ramah difabel<br>2. Sarana/fasilitas pendukung transportasi lainnya sesuai ketentuan teknis dan Peraturan Perundang-undangan   |
| Tanaman Pangan              | P-1  | 1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)<br>2. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat<br>3. Tersedia akses jalan tali<br>4. Tersedianya akses prasarana dan sarana pertanian<br>5. Tersedianya sarana peribadatan di zona tanaman pangan<br>6. Tersedianya papan informasi tentang Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan   |
| Hortikultura                | P-2  | 1. Penyediaan penanda informasi dan patok- patok batas tiap blok zona<br>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)<br>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat  |
| Perkebunan                  | P-3  | 1. Penyediaan penanda informasi dan patok- patok batas tiap blok zona<br>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)<br>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat  |
| Pariwisata                  | W    | 1. Tersedianya papan informasi pariwisata meliputi money changer, rute wisata, objek wisata<br>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)<br>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat.<br>4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai<br>5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul<br>6. Tersedianya tempat penampungan serta pengelolaan limbah dan sampah yang memadai<br>7. Tersedianya jalur pejalan kaki<br>8. Tersedianya pagar pembatas<br>9. Tersedianya tempat sampah komunal |
| Kawasan Peruntukan Industri | KPI  | 1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)<br>2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul<br>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat<br>4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai<br>5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul<br>6. Tersedianya pagar pembatas untuk kegiatan industri<br>7. Tersedianya tanaman peredam kebisingan untuk meredam kegiatan industri  |

| <b>Zona/Sub Zona</b>       | <b>Kode</b> | <b>Prasarana dan Sarana Minimal</b>  |
|----------------------------|-------------|--|
| Perumahan Kepadatan Sedang | R-3         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)</li> <li>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah</li> <li>4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa</li> <li>5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi</li> <li>6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan</li> <li>7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah</li> <li>8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)</li> </ol> |
| Perumahan Kepadatan Rendah | R-4         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)</li> <li>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>3. Menyediakan lubang biopori dan menanam 1 pohon di setiap kavling rumah</li> <li>4. Penyediaan ruang terbuka hijau publik dan sarana pelayanan perumahan seperti peribadatan dan perdagangan dan jasa</li> <li>5. Tersedianya informasi titik kumpul dan jalur evakuasi</li> <li>6. Tersedianya jaringan jalan lingkungan</li> <li>7. Tersedianya saluran pembuangan air limbah</li> <li>8. Tersedianya saluran pembuangan air hujan (drainase)</li> </ol> |
| SPU Skala Kota             | SPU-1       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan</li> <li>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum</li> <li>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>6. Tersedianya jaringan pejalan kaki</li> <li>7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel</li> <li>8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> </ol> |
| SPU Skala Kecamatan        | SPU-2       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan</li> <li>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum</li> <li>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>6. Tersedianya jaringan pejalan kaki</li> <li>7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel</li> <li>8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> </ol> |
| SPU Skala Kelurahan        | SPU-3       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruang untuk kegiatan peribadatan</li> <li>2. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> </ol>  |

| Zona/Sub Zona                  | Kode  | Prasarana dan Sarana Minimal  |
|--------------------------------|-------|---|
|                                |       | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum</li> <li>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>5. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>6. Tersedianya jaringan pejalan kaki</li> <li>7. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel</li> <li>8. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> </ol>   |
| SPU Skala RW                   | SPU-4 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>2. Tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum</li> <li>3. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>4. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>5. Tersedianya jaringan pejalan kaki</li> <li>6. Tersedianya jaringan kebutuhan ruang untuk difabel</li> <li>7. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> </ol>   |
| Perdagangan dan Jasa Skala WP  | K-2   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan</li> <li>7. Tersedianya jalur pejalan kaki</li> <li>8. Tersedianya tempat sampah komunal</li> </ol> |
| Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> <li>2. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>3. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> <li>4. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>5. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>6. Penyediaan ruang terbuka publik dan sarana pelayanan umum berupa peribadatan, perdagangan dan jasa skala lingkungan</li> <li>7. Tersedianya jalur pejalan kaki</li> <li>8. Tersedianya tempat sampah komunal</li> </ol> |
| Perkantoran                    | KT    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai</li> <li>2. Tersedianya jalur pejalan kaki</li> <li>3. Tersedianya tempat sampah</li> <li>4. PSU disesuaikan dengan ketentuan aturan yang berlaku (Norma, standar, pedoman dan manual)</li> </ol>  |
| Pertahanan dan Keamanan        | HK    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya aksesibilitas jalan yang memadai dan terintegrasi dengan permukiman setempat</li> </ol>   |

| <b>Zona/Sub Zona</b> | <b>Kode</b> | <b>Prasarana dan Sarana Minimal</b>  |
|----------------------|-------------|--|
|                      |             | 2. Tersedianya lahan parkir dan prasarana kebersihan yang memadai<br>3. Tersedianya tempat penampungan dan pengelolaan limbah dan sampah yang memadai<br>4. Tersedianya fasilitas mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul |

PJ. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Lampiran XVIII  
 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

TABEL KETENTUAN KHUSUS

I. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

| KETENTUAN KHUSUS                            | LOKASI   | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN  | KETENTUAN KEGIATAN  |
|---|--|-----------|---|---|
| Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6</li> <li>▪ SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5</li> </ul> | 784,45    | 1. Zona Pertanian (P)<br>a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) | <p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya irigasi teknis;</li> <li>2. Diperbolehkan pengembangan produksi komoditas andalan, aktivitas pendukung pertanian, penelitian, dan pendidikan, jaringan dan bangunan irigasi, jalan subak, dan jalan produksi;</li> <li>3. Diperbolehkan kegiatan campuran dominan dengan tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan;</li> <li>4. Tidak diperbolehkan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun;</li> <li>5. Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.</li> </ol> |

## II. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

| KETENTUAN KHUSUS                                   | LOKASI   | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN   | KETENTUAN KEGIATAN  |
|--|--|-----------|--|---|
| Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi | SWP B Blok I.B.4, Blok I.4.5, Blok I.4.6   | 46,15     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Pertanian (P) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Hortikultura (P-2)</li> <li>b. Sub-Zona Perkebunan (P-3)</li> </ol> </li> <li>2. Zona Perumahan (R) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</li> </ol> </li> </ol>   | <p>Ketentuan Khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini;</li> <li>2. diharuskan menyediakan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir;</li> <li>3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah;</li> </ol>   |
| Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan</li> <li>▪ SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.</li> </ul> | 2.738,97  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Pertanian (P) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)</li> <li>b. Sub-Zona Hortikultura (P-2)</li> <li>c. Sub-Zona Perkebunan (P-3)</li> </ol> </li> <li>2. Zona Pariwisata (W)</li> <li>3. Zona Perdagangan dan Jasa (K) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. pendirian bangunan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah mempertimbangkan konstruksi bangunan;</li> <li>5. pengembangan kawasan didahului dengan penyusunan rencana tapak (siteplan);</li> <li>6. diperbolehkan permukiman dengan pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;</li> <li>7. diperbolehkan secara bersyarat pengembangan kawasan permukiman dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang, yaitu hanya untuk kegiatan intensitas rendah;</li> <li>8. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.</li> </ol> |

| KETENTUAN KHUSUS | LOKASI | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN   | KETENTUAN KEGIATAN |
|------------------|--------|-----------|--|--------------------|
|                  |        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)</li> <li>4. Zona Perumahan (R) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</li> <li>b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah(R-4)</li> </ul> </li> <li>5. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</li> <li>b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</li> <li>c. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)</li> </ul> </li> <li>6. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</li> <li>7. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)</li> </ul> |                    |

### III. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

| KETENTUAN KHUSUS             | LOKASI  | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN   | KETENTUAN KEGIATAN  |
|------------------------------|---|-----------|--|---|
| 1. Tempat Evakuasi Sementara | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.5; dan</li> <li>▪ SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5, Blok I.B.6</li> </ul> | 2,74      | 1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</li> <li>b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</li> </ul> | Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tersedianya rambu bencana dan informasi tempat evakuasi minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;</li> <li>2. tersedianya papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;</li> <li>3. tersedianya pemasangan sistem peringatan dini;</li> <li>4. tersedianya lebar jaringan jalan minimal 1 meter untuk mengakomodir ruang gerak evakuasi;</li> <li>5. tersedianya fasilitas penyelamatan diri;</li> <li>6. tersedianya gudang peralatan emergency;</li> <li>7. tersedianya ramp dan/atau tangga menuju tempat evakuasi.</li> </ol> |
| 2. Tempat Evakuasi Akhir     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; dan</li> <li>▪ SWP B Blok I.B.6</li> </ul>                                     | 0,24      | 1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</li> <li>b. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)</li> </ul>        |   |



#### IV. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

| KETENTUAN KHUSUS           | LOKASI   | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN   | KETENTUAN KEGIATAN   |
|----------------------------|--|-----------|--|--|
| 1. Kawasan Sempadan Sungai | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; dan</li> <li>▪ SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.</li> </ul> | 276,44    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Pertanian (P)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)</li> <li>b. Sub-Zona Hortikultura (P-2)</li> <li>c. Sub-Zona Perkebunan (P-3)</li> </ol> </li> <li>2. Zona Perumahan (R)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)</li> <li>b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</li> </ol> </li> <li>3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)</li> </ol> </li> <li>4. Zona Perdagangan dan Jasa (K)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-Zona Perdagangan</li> </ol> </li> </ol> | <p>Ketentuan khusus kegiatan pada Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas Persil yang berada didalam Kawasan sempadan sungai;</li> <li>b. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan</li> <li>c. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas Persil yang berada didalam Kawasan sempadan sungai.</li> </ol> </li> <li>2. ketentuan tata bangunan untuk pengembangan dan pembangunan baru, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GSB minimum 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c. Jarak Bebas Samping minimum 1 (satu) meter; dan</li> <li>d. Jarak Bebas Belakang minimum 1 (satu) meter.</li> </ol> </li> <li>3. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar Sempadan Sungai;</li> <li>b. jalan inspeksi; dan</li> <li>c. prasarana lalu lintas air.</li> </ol> </li> <li>4. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:</li> </ol> |

| KETENTUAN KHUSUS | LOKASI | LUAS (HA) | ZONA PERTAMPALAN   | KETENTUAN KEGIATAN  |
|------------------|--------|-----------|--|---|
|                  |        |           | <p>dan Jasa Skala WP (K-2)</p> <p>b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)</p> <p>5. Zona Pariwisata (W)</p> <p>6. Zona Perkantoran (KT)</p> | <p>a. penataan Sempadan Sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan;</p> <p>b. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai;</p> <p>c. penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan ketentuan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci sesuai aturan yang berlaku;</p> <p>d. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai;</p> <p>e. pengendalian kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk aktivitas wisata alam;</p> <p>f. pemanfaatan Sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan;</p> <p>g. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang tetap dapat dipertahankan; dan</p> <p>h. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya</p> |

| KETENTUAN KHUSUS | LOKASI | LUAS<br>(HA) | ZONA PERTAMPALAN | KETENTUAN KEGIATAN   |
|------------------|--------|--------------|------------------|--|
|                  |        |              |                  | berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan. |

PJ. BUPATI GIANYAR,

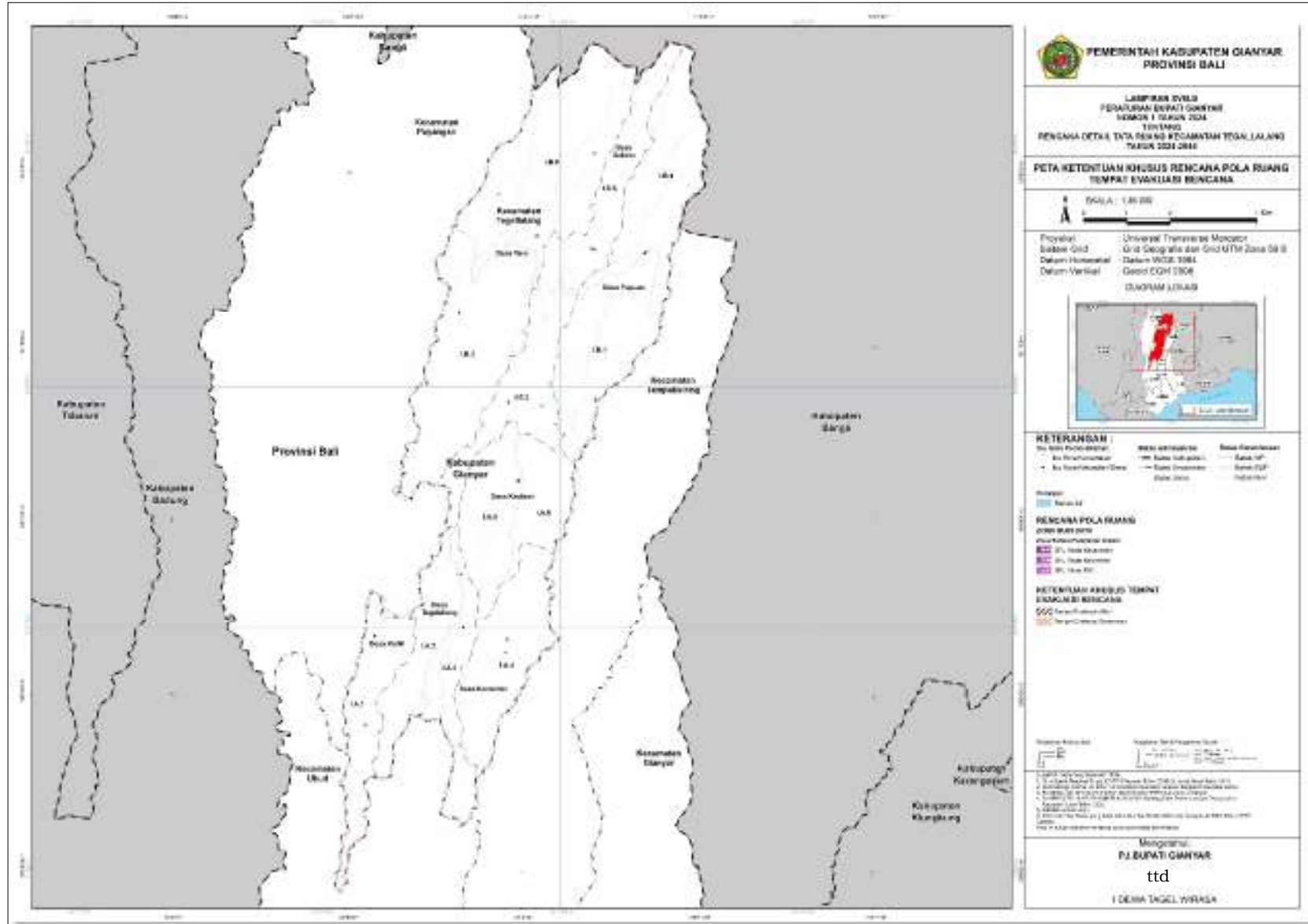
ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

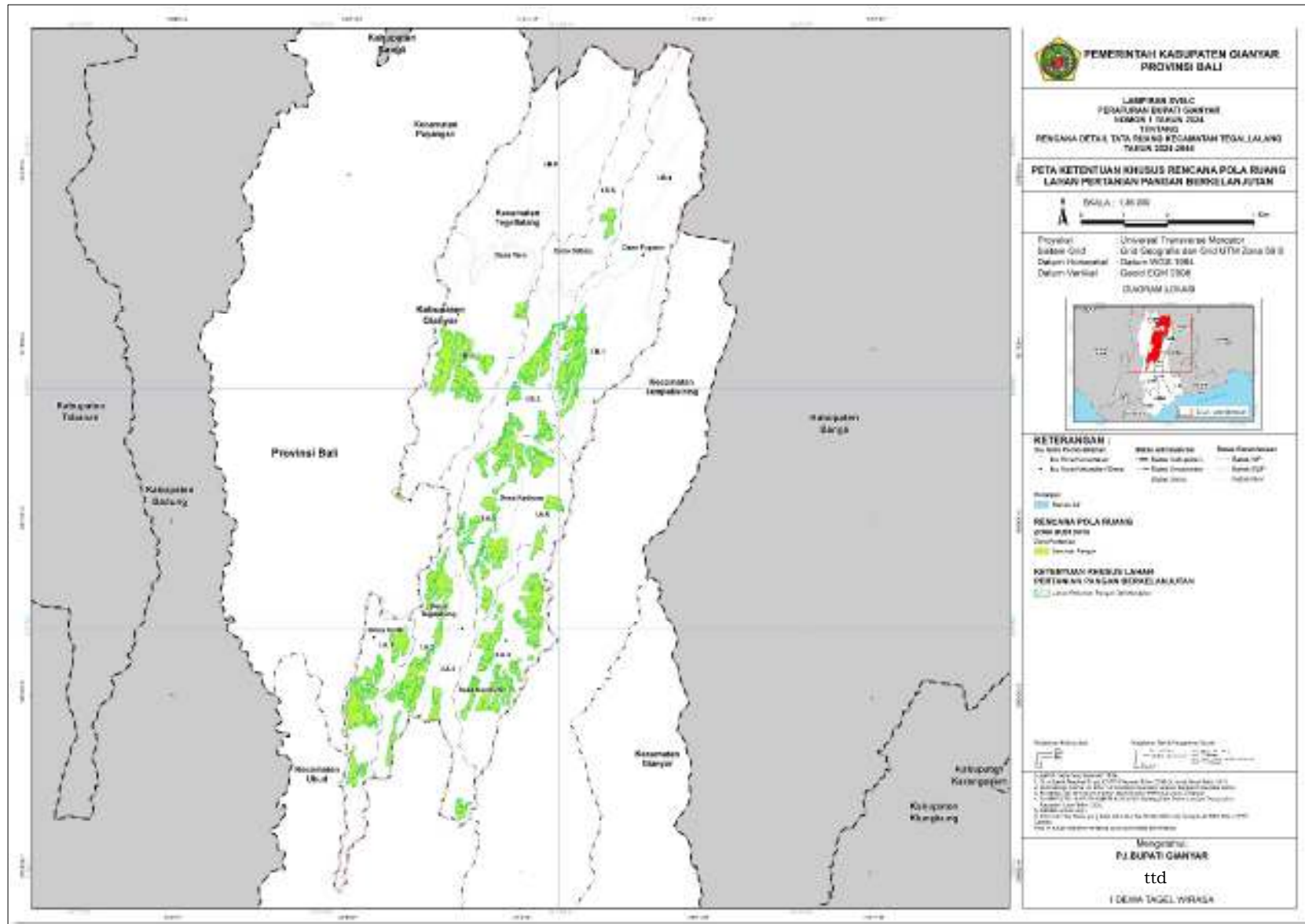


Lampiran XVIII.B  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

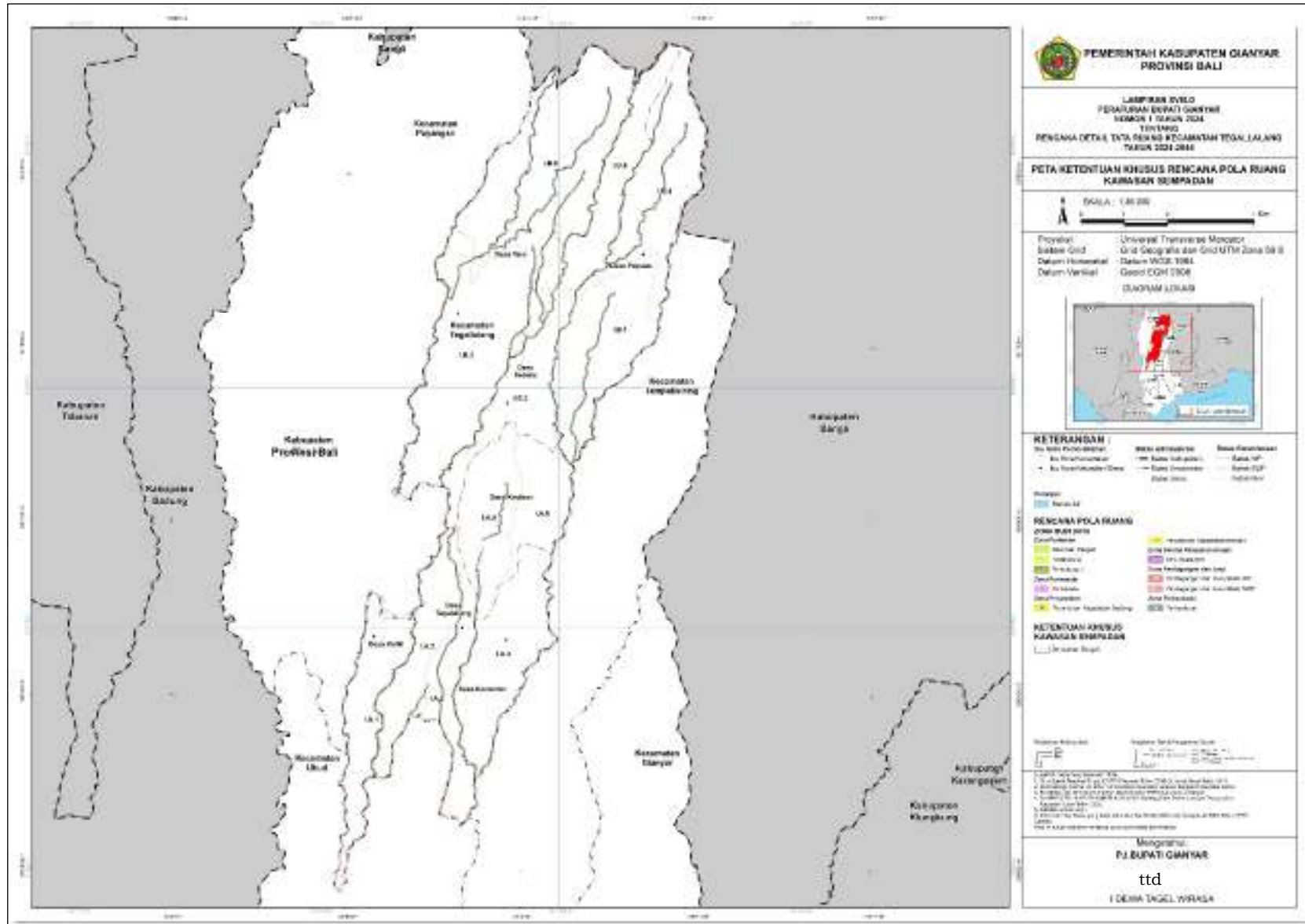


Lampiran XVIII.C  
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang  
Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044



Lampiran XVIII.D  
 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Lampiran XIX  
 Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2024  
 Tentang  
 Rencana Detail Tata Ruang  
 Kecamatan Tegallalang Tahun 2024-2044

TABEL TEKNIK PERATURAN ZONASI

| Zona dan Sub Zona              |     | TPZ                 | Teknik Peraturan Zonasi  |
|--------------------------------|-----|---------------------|--|
| Pariwisata                     | W   | <i>Bonus Zoning</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan lahan dan/atau pembangunan ruang anjung pandang publik;</li> <li>penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>perlindungan terhadap jaringan irigasi disekitar wilayahnya;</li> <li>pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> <li>pembangunan sarana pelayanan umum;</li> </ol> </li> <li>Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang.</li> <li>Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.</li> </ol> |
| Perdagangan dan jasa Skala WP  | K-2 | <i>Bonus Zoning</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> </ol> </li> <li>Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang</li> <li>Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.</li> </ol>  |
| Perdagangan dan jasa Skala SWP | K-3 | <i>Bonus Zoning</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa:</li> </ol>   |



| Zona dan Sub Zona          |     | TPZ                 | Teknik Peraturan Zonasi   |
|----------------------------|-----|---------------------|---|
|                            |     |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>c. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>d. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>e. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang</li> <li>3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.</li> </ol>   |
| Perkebunan                 | P-3 | <i>Bonus Zoning</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>c. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>d. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>e. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> </ol> </li> <li>2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang</li> <li>3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten</li> </ol>  |
| Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | <i>Bonus Zoning</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>c. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>d. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>e. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> </ol> </li> <li>2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang</li> <li>3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.</li> </ol> |

| Zona dan Sub Zona                       |     | TPZ          | Teknik Peraturan Zonasi   |
|---|-----|--------------|---|
| Perumahan Kepadatan Sedang              | R-3 | Bonus Zoning | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boleh menambah intensitas pemanfaatan ruang berupa tambahan KLB dan tambahan KDB diluar ketentuan yang diatur dalam RDTR dengan kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana oleh pengembang berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan lahan dan/atau pembangunan tempat parkir atau tempat parkir bersama;</li> <li>b. penyediaan lahan dan/atau pembangunan RTH;</li> <li>c. pembangunan infrastruktur kestabilan pondasi dan lereng;</li> <li>d. pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan umum;</li> <li>e. penyediaan jalur dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda;</li> </ol> </li> <li>2. Tambahan intensitas pemanfaatan ruang dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi sesuai kajian teknis kestabilan lereng, pondasi dan keamanan struktur dari pihak yang berwenang</li> <li>3. Lokasi kompensasi penyediaan sarana publik dan infrastruktur mitigasi bencana, diarahkan pada sekitar lokasi dimana bonus zoning diterapkan dan/atau pada kawasan lainnya dengan persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten.</li> </ol>   |
| Zona Pariwisata                         | W   | TPZ Khusus   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPZ Khusus Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat dan Pura Kahyangan Tiga/Desa diterapkan dalam rangka menjaga atmosfir kesucian pada area sejauh jarak tertentu disekitar Kawasan Tempat Suci Pura yang ditetapkan sebagai Zona Perlindungan Setempat</li> <li>2. Pembatasan pemanfaatan ruang dan kegiatan pada sekitar Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat Suci atau Pura sebagai lokasi terbangunnya Tempat Suci/Pura ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat dan peruntukan zona lain di sekitar bangunan pura perlu dikendalikan kegiatannya agar tidak mengganggu nilai kesucian pura yang ada;</li> <li>b. peruntukan zona lain di sekitar Tempat Suci/Pura meliputi zona lindung dan zona budidaya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan yang diperbolehkan di luar bangunan pura meliputi kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, permukiman pengempon/penyungsong pura, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal dan Kawasan</li> <li>2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di luar bangunan pura meliputi wisata spiritual, wisata budaya dan wisata alam, fasilitas <i>dharmasala</i>, <i>pasraman</i>, pementasan kesenian, parkir <i>pemedek</i>, infrastruktur permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, fasilitas pariwisata yang tidak mengganggu nilai kesucian; dan</li> <li>3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian dan mengganggu kelestarian lingkungan fisik, lingkungan budaya sekitar kawasan Cagar Budaya.</li> </ol> </li> <li>c. Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan <i>Bhisama</i> Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter</li> </ol> </li> </ol> |
| Sub-zona Tanaman Pangan                 | P-1 |              |   |
| Sub-zona Hortikultura                   | P-2 |              |   |
| Sub-zona Perkebunan                     | P-3 |              |   |
| Sub-zona perdagangan dan jasa Skala WP  | K-2 |              |   |
| Sub-zona perdagangan dan jasa Skala SWP | K-3 |              |   |
| Zona Perkantoran                        | KT  |              |   |
| Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang     | R-3 |              |   |
| Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah     | R-4 |              |   |

| Zona dan Sub Zona  |  | TPZ  | Teknik Peraturan Zonasi   |
|--|--|--|---|
| Sub-zona SPU Skala Kota  | SPU-1  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah/kegiatan penduduk tradisional setempat yang sudah ada.</li> <li>d. blok bangunan pura bebas dari gangguan blok bangunan lainnya;</li> <li>e. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar</li> <li>f. pada waktu tertentu akses jalan menuju kawasan dapat diberlakukan tertutup bagi pergerakan menerus</li> <li>g. tersedia jalur alternatif di luar Kawasan</li> <li>h. terlayani akses transportasi, Ruang parkir dan Ruang pejalan kaki yang nyaman sesuai kebutuhan dan skala pelayanan;</li> <li>i. tersedia jaringan energi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan;</li> <li>j. tersedia jaringan prasarana lingkungan permukiman;</li> <li>k. tersedia sistem jaringan infrastruktur keamanan; dan</li> <li>l. tersedia sistem mitigasi dan penanganan bencana;</li> </ul>   |
| Sub-zona SPU Skala Kelurahan   | SPU-3  |  |   |
| Sub-zona SPU Skala RW  | SPU-4  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pada tempat suci/pura yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, mengikuti ketentuan peraturan bangunan cagar budaya di antaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemugaran bangunan cagar budaya pura mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait cagar budaya dan pengelola pura bersangkutan</li> <li>b. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;</li> <li>c. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting;</li> <li>d. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;</li> <li>e. pengelolaan kawasan cagar budaya melibatkan pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa Adat Setempat;</li> <li>f. mengikuti ketentuan peraturan tentang cagar budaya terkait perubahan bangunan, pemugaran maupun penambahan bangunan di dalam Kawasan / bangunan cagar budaya perubahan/pemugaran harus mendapat rekomendasi tim penilai dan persetujuan Bupati.</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sub-zona Tanaman Pangan</li> <li>2. Sub-zona Hortikultura</li> <li>3. Sub-zona Perkebunan</li> <li>4. Zona Pariwisata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. P-1</li> <li>2. P-2</li> <li>3. P-3</li> <li>4. W</li> <li>5. R-3</li> <li>6. R-4</li> <li>7. K-2</li> <li>8. K-3</li> </ul> | TPZ Zona Pertampalan Aturan ( <i>overlay</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. TPZ zona pertampalan aturan (<i>overlay</i>) merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.</li> <li>2. TPZ Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>) Kawasan Sempadan Jurang, ditekankan kepada penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu:</li> </ul>   |

| Zona dan Sub Zona   |     | TPZ         | Teknik Peraturan Zonasi   |
|---|-----|-------------|---|
| 5. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang<br>6. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah<br>7. Sub-zona perdagangan dan jasa Skala WP<br>8. Sub-zona perdagangan dan jasa Skala SWP |     |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait;</li> <li>b. pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (cut and fill) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>c. jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter;</li> <li>d. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;</li> <li>e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah diutamakan dengan tiang pancang;</li> <li>f. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>g. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.</li> </ol> |
| 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Skala WP   | K-2 | TPZ Lainnya | <p>TPZ lainnya merupakan TPZ yang memberikan Teknik pengaturan khusus pada spot obyek wisata <i>Ceking Rice Terrace</i> yaitu koridor jalan utama dengan jalur berpemandangan indah dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan bangunan pada sisi timur jalan tidak menghalangi pemandangan terasering sawah;</li> <li>2. Ditetapkan pada bangunan yang telah berdiri dan memperoleh ijin membangun sebelum ketentuan ini diberlakukan;</li> <li>3. Tidak diizinkan menambah bangunan baru serta menambah luas lantai dan tinggi bangunan;</li> <li>4. Fasade bangunan berkearifan lokal Bali dan dijaga penampilannya;</li> <li>5. Harus membuka akses bagi publik dan menyediakan jalur pedestrian untuk mengakses obyek wisata dengan jalur minimum 2 (dua) meter.</li> </ol>   |

PJ. BUPATI GIANYAR

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA